

**PEMBINAAN KARANG TARUNA DI DESA BATULAPPA KECAMATAN
PATIMPENG KABUPATEN BONE**

ANDI AKBAR

Nomor Stambuk : 10561 04656 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PEMBINAAN KARANG TARUNA DI DESA BATULAPPA KECAMATAN
PATIMPENG KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI AKBAR

Nomor Stambuk : 10561 04656 13

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Andi Akbar
Nomor Stambuk : 10561 04656 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S. Sos, M. Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

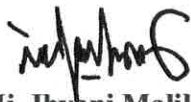
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0839 / FSP / A. 1 – VIII / VI / 39 / 2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S. 1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Selasa tanggal 5 bulan juni tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



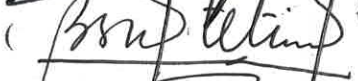



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

- 1 Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua) ()
- 2 Dr. Abdul Mahsyar, M.Si ()
- 3 Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si ()
- 4 Dr. Abdi, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Akbar

Nomor Stambuk : 10561 04656 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Mei 2018

Yang Menyatakan,

Andi Akbar

ABSTRAK

ANDI AKBAR. Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi).

Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sangat berguna untuk mengetahui bentuk atau pola pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dan kontribusi Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone agar tercapainya tujuan Karang Taruna.

Tipe penelitian ini bersifat studi kasus. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dimana penulis mewawancarai 9 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan pola pembinaan fungsional dan pembinaan teknis sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pembinaan baik kepada anggota dan pengurus maupun yang bersentuhan langsung kepada masyarakat terlihat dari koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan secara maksimal, kolaborasi yang dilakukan belum efektif dan kurangnya kerjasama antara kedua belah pihak, bimbingan yang belum ada dilakukan juga fasilitas dan pengembangan Karang Taruna belum berjalan maksimal serta kurangnya kontribusi dalam pembinaan Karang Taruna dari Pemerintah Desa dan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan dari segi fasilitas penunjang keterampilan dan pemberdayaan Karang Taruna.

Kata Kunci : Pembinaan, Fungsional, Teknis, Karang Taruna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Abdi, M.Pd selaku Pembimbing II yang selama ini memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis, yang sabar dan tulus membimbing penulis dengan segala kekurangannya, baik itu dalam bentuk diskusi, arahan, kritik dan saran yang sangat konstruktif sejak usulan seminar proposal penelitian hingga berlangsungnya ujian skripsi, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu menggapai gelar sarjananya, Tak lupa pula penulis hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Almarhum Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Pembimbing I yang selama ini memberikan

banyak arahan dan masukan kepada penulis sampai usulan seminar proposal penelitian. Penulis mengirimkan Al-Fatihah dan doa semoga Khusnul Khatimah di Alam sana. Amin.

Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu \politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis menduduki bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang ini serta Bapak dan Ibu Dosen program Ilmu Administrasi Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Bahri Ahmad, SE, Haeruddin Mallanti, A. Adhar, ST, A. Haris, Awal Ramadhan, Suyuti Awal, Ihsan Abadi, Agus Wisman dan Sunardi yang telah menjadi informan dalam penelitian penulis. Teman-teman Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA), dan yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Yaitu : Eva Novianti, Andi Echa, Sardiman Saad, Muh. Ikhsan, Sapriadi, Raif, Suhardi, Salfianti, Nilam

Cahaya, Kismawati, Naslia Gasang, Nurul Afifah, Hamdan, A.Haswirah, Rahmatullah, Putri Sinta Sari, Clara Dheby, Nurwana, Hamdam Teman-teman Kelas B Aministrasi Negara serta yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah menyemangati dan memberikan *support* kepada penulis dalam suka dan duka. Kepada para Kakanda yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Yaitu Kakanda Fitriarningsih, A.Azimatul Fauziah, Nurlinda Hasan, Arsyad, Iwan, Alim Bakri, Musmain, Muh. Yusuf Azis, Rahmat Bahtiar, Aryadi Tri Putra Mahmud, Riswanto, Andri Fadillah Pratama Putra, Alam Putra Bori Atmadja, dan yang lain-lain tidak sempat penulis sebutkan. Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Adinda Angkatan 2014, 2015, 2016, 2017 Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Senior dan Saudara di Kepmi Bone Kom. Taro Ada Taro Gau Universitas Muhammadiyah Makasar, Teman- Teman di DPC Kepmi Bone Kecamatan Patimpeng terima kasih atas bantuannya selama ini.

Terkhusus kepada kedua Orang Tuaku Ayahanda penulis A.Kadir, Ibunda penulis Alm. A.Esse, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan membantu penulis berupa materi maupun non materi. Seluruh saudara penulis A.Husniwati, A. Husnawati, A.Sarianti, dan Tanteku A.Subaeda yang telah menjadi orang tua penulis yang terus memberikan nasehat, motivasi, dan bantuan kepada penulis berupa materi dan non materi, serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga bantuan dari semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin. Skripsi ini telah penulis susun sedemikian rupa, namun penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangsih dari para pembaca baik itu berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun, demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 01 Mei 2018

Andi Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Pembinaan	8
B. Pemerintah Desa.....	17
C. Konsep Karang Taruna	23
D. Pembinaan Karang Taruna.....	26
E. Kerangka Pikir	29
F. Fokus Penelitian	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum.....	39
B. Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa.....	48
C. Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1	Data Informan Penelitian	34
2	Jumlah Penduduk Desa Batulappa Berdasarkan Jenis Kelamin	39
3	Jumlah Penduduk Desa Batulappa Berdasarkan Kelompok Usia	40
4	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Batulappa	40
5	Program Kerja Umum Karang Taruna di Desa Batulappa	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2. Penerimaan Surat Penelitian Di Kantor Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 3. Setelah Wawancara Dengan Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 4. Wawancara Dengan Ketua Umum Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 5. Wawancara Dengan Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 6. Wawancara Dengan Anggota Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 7. Orientasi Pengurus Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 8. Papan Nama Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Gambar 9. Papan Informasi Monografi Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Penulisan Skripsi

Lampiran 2. Surat Keterangan Pengantar Penelitian Ke LP3M Unismuh Makassar

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian Ke UPT P2T PKPMD Sul-Sel

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Ke Bupati Bone

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Ke Camat Patimpeng Kabupaten Bone

Lampiran 6. SK Izin Penelitian Ke Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng
Kabupaten Bone

Lampiran 7. SK Pengurus Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng
Kabupaten Bone

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karang Taruna ialah suatu badan yang bergerak dibidang sosial untuk menjadi ruang dan tempat mengembangkan kreatifitas masyarakat, terutama pemuda yang memiliki kesadaran penuh serta memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat dalam desa atau kelurahan bergerak pada bidang kesejahteraan sosial. Seperti halnya pada bidang budaya, keterampilan, olahraga, agama, ekonomi dan seni. Namun tetap berpacu pada tujuan dibentuk dan didirikan Karang Taruna, yaitu menjadi perhimpunan untuk melakukan pembaharuan kapasitas pemuda yang ada dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri agar bisa lebih kreatif.

Sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, Karang Taruna adalah salah satu wadah atau tempat melakukan pembinaan dan pemberdayaan dengan cara menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan sosial, budaya, seni, agama, ekonomi dan olahraga. Serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat baik sumber daya manusia, sumber daya uang dan sumber daya alam yang telah tersedia. Sebagai tempat dan ruang melakukan pembinaan, Karang Taruna mempunyai beberapa rencana program kerja yang akan dilaksanakan mengikutsertakan setiap anggota kelompok masyarakat dan pemerintah dalam Desa atau Kelurahan bersangkutan.

Sebagai organisasi atau perkumpulan yang memiliki tugas pokok dengan bekerja sama antara Pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat untuk melakukan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial masyarakat. Karang Taruna

harus sanggup membuktikan tugas serta peranannya secara maksimal. Sebagaimana Karang Taruna melaksanakan tugas pokoknya, Karang Taruna mempunyai fungsinya yaitu :

- a) Untuk mencegah agar tidak terjadi kasus mengganggu keamanan masyarakat khususnya generasi muda.
- b) Melaksanakan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi, jaminan sosial serta pendidikan dan pelatihan bagi tiap peserta khususnya pemuda desa.
- c) Meningkatkan kreatifitas Usaha Ekonomi Produktif.
- d) menumbuhkan, memperkuat, meningkatkan dan memelihara pengetahuan dan tanggungjawab para pemuda untuk mengambil bagian dan giat pada pengendalian keamanan dalam masyarakat.
- e) menumbuhkan, memperkuat, meningkatkan dan memelihara kearifan lokal.
- f) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan semangat kebangsaan.

(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 / HUK / 2010 pasal 6)

Sebagai lembaga bergerak dibidang sosial, karang taruna juga berlandaskan pada regulasi telah mengatur semua struktur pengurus serta masa jabatan masing-masing setiap wilayah dari desa atau kelurahan sampai pada tingkat pusat. Pedoman ini adalah representatif untuk regenerasi organisasi masyarakat. Adapun untuk kelancaran dan kelanjutan dari organisasi baik untuk masa sekarang maupun diwaktu kemudian dalam proses pembinaan telah di atur peraturan Karang Taruna.

Anggota Karang Taruna ialah pemuda yang telah berusia mulai 13 tahun – 45 tahun. Serta pengurus yang telah berusia 17 tahun – 45 tahun.

Sebagai organisasi yang memiliki struktur kepengurusan yang lengkap. Setiap anggota agar bisa melaksanakan tugas serta fungsinya sinkron pada keahlian masing-masing. Serta dapat bekerja sama dibantu dengan tata laksana secara sistematis. Setiap bidang memiliki program kegiatan yang jelas berdasarkan dengan kebutuhan organisasi dan kasus yang muncul disekitarnya. Program Kerja Karang Taruna berlangsung secara terorganisir, berkelanjutan dan berkesinambungan yang mengikut sertakan seluruh generasi muda dalam desa. Kreatifitas dan inovasi Karang Taruna untuk menghasilkan modal teratur berasal dari negara maupun donatur yang tidak mengikat untuk melaksanakan program kerja dalam masyarakat.

Sarana dan prasarana yang memadai harus dimiliki Karang Taruna secara efektif dan efisien. Keberadaan Karang Taruna harus menjadi patron serta sebisa mungkin menunjukkan peran serta fungsinya secara maksimal sehingga ada pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat dan lembaga lain yang ikutserta pada pembaharuan dan pengembangan Desa atau Kelurahan khususnya pengembangan dibidang Kesejahteraan Sosial.

Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone ini seharusnya hadir sebagai pemberi solusi untuk masyarakat desa setempat. Namun hal tersebut kontradiktif sama tugas pokok Karang Taruna. Sementara masyarakat saat ini sementara mengembangkan ladang lombok serta kebun buah naga. Namun Karang Taruna tidak memberikan sumbangsi yang nyata kepada masyarakat yang

seharusnya menjadi tanggung jawabnya dalam mengembangkan kreatifitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat tersebut.

Sehingga dalam meningkatkan kinerja dan perannya Karang taruna menjadi perkumpulan kepemudaan yang aktif pada aspek kesejahteraan sosial, haruslah membutuhkan pembinaan yang lebih baik. Pembinaan harus berawal dari taraf Desa atau Kelurahan sampai dari tingkat pusat. Menurut Wibowo (2007:165) segala sumber daya manusia dalam organisasi, meskipun telah melewati masa penyaringanakan tetapi pada proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih sering berhadapan dengan persoalan yang sulit dirampungkan sendiri. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dengan demikian, pembinaan merupakan suatu metode dan juga sasaran. Secara metode, pembinaan secara kelompok di dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk setiap orang atau pemuda yang menghadapi disegala macam bidang keamanan dan ketentraman setiap aktivitas . Secara sasaran, maka pembinaan masyarakat harus menunjuk pada dampak yang hendak diraih pada transformasi, dalam artian masyarakat dan pemuda berdaya guna. Adanya kekuasaan serta pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemenuhan dalam segala aspek kehidupam baik yang bersifat fisik, sosial, maupun ekonomi seperti adanya kepercayaan diri yang tinggi, bisa menyampaikan segala aspirasinya, mempunyai mata pencaharian menetap, ikut serta pada aktivitas bermasyarakat, dan bebas menjalankan tanggung jawab kehidupannya.

Pembinaan secara umum di tingkat nasional, melakukan koordinasi ke tingkat bawah. Serta di tingkat bawah melakukan pengukuhan kepengurusan di tingkat masing-masing. Sementara pembinaan secara fungsional, melakukan bimbingan organisasi, program kerja dan aktivitas dalam rencana melakukan pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna, serta secara fungsional dalam melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan kerja sama dengan kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi sampai Nasional.

Pembinaan secara teknis berfungsi memfasilitasi, membimbing secara berkelanjutan dan pengembangan kepada Karang Taruna selaras dengan tugas pokok serta fungsinya dalam pelaksanaan program kerja konsisten pada keadaan tiap-tiap Karang Taruna. Karang Taruna dimohon sanggup memberikan solusi dan menyelesaikan bermacam-macam kasus kesejahteraan sosial para pemuda dan masyarakat umumnya. Sebagai wahana partisipasi masyarakat, Karang Taruna akan selalu mendukung, memberikan semangat, dorongan dan membantu pembangunan melalui rancangan kegiatan yang sudah dikonsep Karang Taruna.

Dengan adanya modal kapasitas dan stabilitas maksimal dari Karang Taruna. Sehingga akan mampu bekerja secara maksimal untuk menangani segala permasalahan kesejahteraan sosial dan masalah sosial yang ada di Desa atau Kelurahan menjadi berkurang atau hilang. Beberapa rancangan kegiatan Karang Taruna konstruktif pada masyarakat secara umum, seperti : pencegahan tumbuhnya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain-lain melalui kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain.

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang tersebut, penulis akan membahasnya, dengan judul “ Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bagaimana bentuk atau pola pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone ?
- b) Bagaimana kontribusi Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bentuk atau pola pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
- b) Untuk mengetahui kontribusi Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan agar dari penelitian ini bisa memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

- b) Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya pada metode pembentukan pola pembinaan oleh pemerintahan yang baik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dampak dari riset ini dimohon sebagai informasi pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

- a) Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang dan kesempatan yang baik guna menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini hendaknya dijadikan kritikan membangun untuk menjadi perbaikan khusus bagi instansi terkait dengan penelitian ini.
- c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan secara konseptual berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau pemberdayaan). Sebab itu, ide pokok dalam pembinaan merujuk pada konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali disangkut pautkan dan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan, diluar dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kekuatan dan kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat, khususnya kalangan bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar sehingga ada kebebasan (*freedom*) yang dimiliki, dalam artian bukan hanya bebas menyampaikan pendapat melainkan bebas dari ketertindasan, bebas dari rasa lapar dan bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau segala sesuatu untuk produktifitas yang menjadikan peningkatan dalam pendapatan serta barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh.
- c) Berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi taraf kehidupan mereka.

Pembinaan secara bahasa berasal dari kata "bina". Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara melakukan pembinaan, perubahan kearah lebih baik, adanya usaha dan tindakan yang dilakukan yang memiliki daya guna melalui kegiatan agar menghasilkan daya guna yang baik.(KBBI, 2001).

Menurut Musanef (2000) mengemukakan bahwa pembinaan adalah segala sesuatu yang dilakukan melalui usaha yang berhubungan langsung mulai dari tahap perencanaan, penyusunan program, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta melakukan pengendalian dari segala sesuatu yang berdaya guna dan pencapaian hasil guna yang baik.

Sedangkan menurut Thoha (2001) pembinaan merupakan suatu proses, untuk mencapai hasil atau pertanyaan untuk bisa lebih baik dari sebelumnya, pencapaian dalam hal ini dapat mewujudkan adanya suatu perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi dari berbagai kemungkinan yang terjadi.

Pembinaan menurut Ahmad Tanzeh (2009) dapat diartikan sebagai bantuan dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Sedangkan pendapat Widjaja (2000) menyatakan bahwa pembinaan adalah adanya suatu proses untuk melakukan pengembangan yang mencakup urutan pengertian, berawal dari pembentukan, saling membutuhkan, pemeliharaan hubungan yang disertai proses perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut berkaitan kegiatan dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Mathis (2002), pembinaan adalah suatu proses pencapaian daya maksimal kemampuan seseorang agar tujuan organisasi dapat tercapai. Oleh sebab

itu, dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pembinaan dapat diartikan secara sempit maupun secara luas.

Sedangkan Ivancevich (2008), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan usaha pegawai dalam pekerjaannya sekarang maupun dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Dari definisi tersebut, Ivancevich memberikan penekanan bahwa dalam proses pembinaan dilakukan agar ada perubahan perilaku kerja dari pegawai secara sistematis untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut.

Dengan demikian, pembinaan adalah usaha untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kreatifitas individu atau kelompok untuk mencapai dan meningkatkan kinerja individu ataupun kelompok tersebut.

2. Tahap – Tahap Pembinaan

Menurut Sumodiningrat (Sulistyaningsih, 2004), Proses pembinaan dilakukan tidaklah terus menerus, melainkan untuk dapat menjadi mandiri, walaupun ada kontrol dari kejauhan agar tidak jatuh lagi. Sehubungan dari pendapat tersebut bahwa pembinaan menitik beratkan pada suatu proses untuk terus belajar agar bisa berdiri sendiri atau mandiri. Sebagaimana yang dikemukakan diawal ada tahapan dalam proses pembinaan tidak langsung begitu saja menjadi mandiri. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

- a) Tahap penyadaran yang menjadikan adanya pembentukan perilaku, dengan ini dapat menimbulkan kesadaran diri dan kepedulian sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- b) Tahap transformasi kemampuan, dalam hal ini meningkatkan pengetahuan, kecakapan, kreatifitas untuk berinovasi dan pelatihan keterampilan dasar sehingga dalam pembangunann dapat mengambil peran.
- c) Tahap peningkatan kapasitas dan kemampuan intelektual, kecakapan, kreatifitas sehingga muncullah inisiatif untuk berinovasi sehingga dapat menjadi mandiri.

Lebih lanjut Sedarmayanti (2004) menjelaskan, kata pembinaan (*empowerment*) memberikan butiran penting tentang sikap mental yang tangguh. Dalam proses pembinaan memiliki dua kecenderungan yaitu :

- a) Kecenderungan Primer, dalam proses pembinaan yang menitik beratkan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar seseorang menjadi lebih berdaya guna, untuk mendukung proses ini juga harus dilengkapi upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- b) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses rangsangan, memberikan dorongan, dan memberikan motivasi agar seseorang dalam proses dialog ada kemampuan yang dimiliki untuk menentukan arah pilihan hidupnya.

Dari dua kecenderungan tersebut agar dapat mewujudkan kecenderungan primer maka kecenderungan sekunder harus lebih sering dilalui terlebih dahulu.

Selanjutnya Tikson (dalam Sani 2000) menjelaskan bahwa untuk mencapai proses pembinaan dalam masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, antara lain :

a) Pengorganisasian masyarakat

Dalam pengorganisasian masyarakat yang dimaksud adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Ada beberapa bentuk untuk melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi ini menjadi alat dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan kehendak mereka serta untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

b) Penguatan kelembagaan

Pada dasarnya kegiatan ini sebagai penguatan untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi yang sudah ada sebelumnya. Melalui peningkatan pengetahuan, sumber daya, keterampilan dan kreatifitasnya. Termasuk juga penguatan proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang menjadi landasan sebuah organisasi agar kegiatan secara kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Banyak hal yang dilakukan dalam penerapan penguatan kelembagaan bisa melalui pendidikan dan pelatihan, keterampilan, juga kunjungan kerja. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan dasar kepemimpinan, penerapan pedoman organisasi dan manajemen keuangan, kunjungan kerja dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

c) Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik.

Termasuk kegiatan pengembangan organisasi sebagai bentuk pembaharuan organisasi yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, pelatihan, sosialisasi kesehatan, rekreasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi benefit diperlukan untuk memberikan sumbangsi untuk berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada sehingga membuka lapangan pekerjaan lebih luas. Kegiatan bersifat penghijauan, konservasi dan rehabilitas lingkungan agar ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Sejalan dengan hal tersebut, Ohama (2001) memberikan gambaran dalam proses pembinaan masyarakat lokal menggunakan dua unsur pembangunan, yaitu:

- a) Sumber daya, yang dimaksudkan adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan teknologi.
- b) Organisasi sebagai pelaku, dalam hal ini norma dan nilai yang membatasi atau mengatur anggota dalam pencapaian tujuan.

3. Strategi dan Prinsip Pembinaan

Dalam melakukan proses pembangunan dan pembinaan masyarakat sangat di perlukannya berbagai cara dan strategi serta usaha agar taraf kehidupan masyarakat jauh lebih baik. Dalam hal ini, untuk mencapai pembangunan masyarakat ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan (Salman, 2005) antara lain :

- a) Pendekatan *self help* (menolong diri sendiri), artinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosialnya masyarakat sendiri yang melakukan.

Dengan asumsi bahwa masyarakat bisa memecahkan masalahnya dengan sendirinya.

- b) Pendekatan *technical assistance* (bantuan teknis), artinya bahwa struktur masyarakat dapat mempengaruhi perilaku. Asumsi dalam pendekatan ini bahwa dengan memberikan bantuan teknis seperti teknologi, informasi, atau cara berfikir sehingga dapat saling bekerja sama dengan masyarakat.
- c) Pendekatan *conflict* (konflik), artinya bahwa adanya adanya pengelompokan- pengelompokan dalam masyarakat sehingga bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mendapatkan sumber daya yang ada sehingga kondisi ekonominya dalam terselesaikan.

4. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan secara operasional harus diketahui yang menjadi fokusnya. Fokusnya dapat diketahui melalui berbagai indikator seperti keberdayaan yang dapat menunjukkan individu berdaya guna atau tidak. Sehingga dalam melakukan program pembinaan sosial akan bisa lebih terarah dan mengenai sasaran yang dilakukan pembinaan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Dalam melakukan pembinaan Schuler, Hasmaeni dan Riley (Suharto, 2004) membagi delapan indikator pengembangan, yang biasa disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pembinaan. Keberhasilan dalam melakukan pembinaan masyarakat dapat dinilai dan dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut keamanan hidupnya, kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Dari ketiga aspek diatas berkaitan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power*

with in), kekuasaan atas (*power over*), kekuasaan untuk (*power to*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Menurut Sumodiningrat (Sulistyaningsih, 2004), Proses pembinaan dilakukan tidaklah terus menerus, melainkan untuk dapat menjadi mandiri, walaupun ada kontrol dari kejauhan agar tidak jatuh lagi. Sehubungan dari pendapat tersebut bahwa pembinaan menitik beratkan pada suatu proses untuk terus belajar agar bisa berdiri sendiri atau mandiri. Namun agar kemandirian dapat terjaga harus ada pemeliharaan yang terus menerus dari segi kemampuan, semangat dan kondisi agar tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Tikson (2001), untuk mengelola sumber daya, ada model alternatif yang diterapkan sehingga kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa dapat meningkat yaitu model pembangunan (*community development*). Sasaran utama model ini adalah dimana bisa membantu masyarakat agar bisa meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam model pembangunan ini yaitu agar terciptanya masyarakat yang bisa menjadi mandiri atau masyarakat yang bisa berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimiliki serta dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomiannya.

Sepemahaman dengan yang disampaikan diatas, Gany (2001) menyatakan bahwa dalam konsep pembinaan dibutuhkan upaya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu tatanan agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi mandiri. Dalam artian dalam proses pembinaan yaitu adanya usaha-usaha yang dilakukan

untuk membangun diri sendiri dari setiap orang dalam suatu tatanan agar bisa menjadikan kondisi yang lebih baik.

Hasil dari pemikiran tersebut di atas, maka terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengembangan aktivitas pembinaan yaitu :

- a) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- b) Untuk mengembangkan diri dan pengembangan produksi harus mendapatkan jalan untuk ke sumber daya materi dan sumber daya non materi.
- c) Fungsi dari organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat sebagai wadah untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi masyarakat melalui kegiatan secara kolektif dan kolegal.

Oleh karena itu, pembinaan adalah suatu cara yang dilakukan dengan memberikan semangat, dorongan dan motivasi bagi sumber daya yang ada dan adanya penguatan secara individu dan kelompok dalam organisasi agar potensi dalam diri dapat bangkit atas dasar kesadarannya. Salah satu tujuan dari melakukan pembinaan masyarakat adalah agar fenomena kemiskinan semakin berkurang dalam masyarakat.

5. Fungsi Pembinaan

Dalam sebuah organisasi agar bisa mendapatkan hasil kerja yang baik, maka perlu adanya anggota atau pegawai yang sadar akan tanggung jawab yang di amanahkan, loyal, patuh pada aturan, penuh dedikasi, disiplin, jujur, setia dan taat

dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, adapun fungsi pembinaan menurut Thoha (2001) yaitu diarahkan untuk :

- a) Menumbuhkan rasa kesetiaan dan ketaatan.
- b) Adanya amanah yang di jalankan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian diri dalam menjalankan tugas yang harus ditingkatkan.
- c) Meningkatkan semangat akan produktivitas kerja secara maksimal.
- d) Mewujudkan suatu pelayanan prima dalam organisasi dan pegawai tanpa korup serta berwibawa.
- e) Melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai dengan cara proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan dengan kebutuhan organisasi.

B. Pemerintah Desa

Pemerintah secara etimologi berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006) adalah sebagai berikut:

- a) Perintah adalah suatu bentuk pernyataan yang membuat orang lain melakukan sesuatu.
- b) Pemerintah adalah orang yang memiliki kekuasaan penuh melakukan perintah dalam suatu negara atau daerah atau suatu badan tertinggi yang memiliki legitimasi untuk memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c) Pemerintahan adalah sistem yang mengatur dalam tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait

dengan segala cara, hal, urusan dan sebagainya dalam memerintah guna mencapai tujuan negara itu sendiri.

Samual Finer (2006) mengemukakan bahwa dalam pemerintahan terdapat pemerintah yang terbagi atas dua pengertian yaitu pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas, pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah dalam arti sempit adalah pemegang kekuasaan penuh untuk melakukan perintah hanya ada pada Eksekutif dalam artian hanya Presiden yang dibantu para Menteri yang menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan Negara.
- b) Pemerintah dalam arti luas adalah pemegang kekuasaan penuh untuk melakukan perintah tidak hanya pada Eksekutif, melainkan ada Legislatif dan Yudikatif yang juga menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka akan muncul perbedaan yang dapat memberikan gambaran perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu wewenang kekuasaan yang mengurus pelaksanaan pemerintahan hanya ada ditangan eksekutif (Presiden beserta Menterinya). Sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas adalah wewenang kekuasaan yang mengurus pelaksanaan pemerintahan tidak hanya ada ditangan eksekutif, namun juga termasuk Legislatif yang membuat kebijakan dan perundang – undangan, serta Yudikatif yang melakukan proses peradilan (Inu Kencana Syafie, 2005).

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu kencana Syafie, menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti (2005) :

- a) Menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain (*the activity thr process of roverning*).
- b) Menunjukkan masalah – masalah negara dimana setiap kegiatan ataupun proses diatas dijumpai (*states of affairs*).
- c) Menunjukkan orang – orang (pejabat – pejabat) yang diberikan tugas – tugas untuk memerintah (*people changed with the duty of governing*).
- d) Menunjukkan suatu metode, cara atau sistem dimana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

Menurut Carl J. Frederich (Titik Triwulan Tutik, 2005) pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menjadi pemegang kekuasaan penuh dalam negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai eksekutif saja, namun juga menjalankan tugas sebagai legislatif dan yudikatif.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan diatas dapat mengambil suatu rumusan bahwa pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu proses memerintah yang dilakukan oleh badan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing menjalankan tugasnya agar tujuan pemerintahan negara dapat tercapai, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu suatu proses

memerintah yang hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif beserta jajarannya untuk mencapai tujuan pemerintahan negara (Titik Triwulan Tutik, 2005).

Pemerintah dalam arti luas memiliki suatu kewenangan untuk menjaga serta memelihara kedamaian dan keamanan dalam negara, ke dalam dan keluar. Oleh sebab itu, pertama harus adanya kekuatan militer yang dimiliki atau kemampuan untuk mengendalikan dalam angkatan perang. Kedua, harus ada kekuatan legislatif untuk membuat kebijakan atau undang – undang sebagai regulasi negara. Ketiga, harus ada finansial atau keuangan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan peraturan dalam negara sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan negara.

Tujuan adanya lembaga – lembaga dalam negara atau perangkat kelengkapan negara yaitu untuk menjalankan tugas sebagai fungsi negara dan menjalankan tugas sebagai fungsi pemerintahan secara aktual. Dalam menjalankan fungsi negara harus ada satu kesatuan antara lembaga satu dengan lembaga lain dalam proses antara yang satu dan yang lain saling berhubungan. (Luthfi Widagdo Eddyono, 2010).

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya pembagian kekuasaan secara horisontal (mendatar) dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal (kebawah). Menurut pendapat Jimly Asshidiqie bahwa dalam pembagian kekuasaan yang secara vertikal yang artinya perwujudan kekuasaan itu diberikan secara vertikal kebawah. Pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal berarti ada disposisi kekuasaan dari atasan ke bawahan dalam pemerintahan kekuasaan (Juanda, 2008).

Menurut Sunarno (2005) sistem pemerintahan di Indonesia meliputi :

- a) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- b) Pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- c) Pemerintahan desa.

Desa adalah sekelompok masyarakat atau satu kesatuan masyarakat secara hukum yang segala urusan rumah tangganya ada kewenangan penuh tanpa campur tangan yang lain sesuai dengan hukum adat istiadat dan hak asal usul yang mendapat pengakuan dalam pemerintahan secara nasional yang berada di Kabupaten. Sesuai yang tertera dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Widjaja (2003) Desa adalah sekelompok masyarakat secara hukum yang mempunyai struktur asli yang berasal dari hak asal usul yang memiliki sifat istimewa. Acuan dalam pendapatnya bahwa didalam Pemerintahan Desa ada suatu kebebasan, perbedaan dalam keanekaragaman, aturan yang mengikat, keikutsertaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa atau Kelurahan menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah sekelompok masyarakat atau satu kesatuan masyarakat secara hukum yang segala urusan rumah tangganya ada kewenangan penuh tanpa campur tangan yang lain yang memiliki batas wilayah masing-masing sesuai dengan hukum adat istiadat dan hak asal usul yang mendapat pengakuan dalam pemerintahan secara nasional yang berada di Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan gambaran mengenai Desa yang memiliki hak penuh untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang

ada dalam daerahnya. Ada kebebasan tersendiri dalam pemerintahannya baik dari pemilihan Kepala Desa, Anggaran Dana Desa, pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, pembuatan peraturan desa, sehingga bisa menjadikan otonomi itu menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Inilah yang menjadi akar dalam sebuah reformasi untuk menjadikan suatu Desa atau Kelurahan sadar akan konstitusi yang bersifat hakiki.

Desa adalah sekelompok orang yang melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Berdasarkan pemahaman ini artinya Desa tidak mendapatkan intervensi dari manapun dalam mengatur dan mengurus masyarakat, ada wewenang penuh dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu Desa memiliki posisi yang sangat strategis dengan adanya otonomi asli yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena perwujudan otonomi daerah ada pada otonomi desa.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri baik pada masyarakat maupun pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat pemerintahan lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun Peran pemerintah daerah yaitu mengurus dan mengatur daerahnya sendiri baik masyarakatnya maupun pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban serta wewenang dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut undang – undang. Yang lebih difungsikan untuk pelaksana teknis kebijakan desentralisasi diberikan kepada Pemerintah

daerah. Sehingga wajar ketika pemerintah daerah memahahi keberadaan desentralisasi sebagai bentuk kewajiban daripada sebagai hak.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya sendiri. Sementara Kepala Desa melakukan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan segala pelaksanaannya kepada Bupati.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah suatu kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

C. Konsep Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Karang taruna adalah suatu wadah yang bergerak dibidang sosial kepemudaan yang keberadaannya pada Desa atau Kelurahan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan kreatifitas pemuda untuk mengembangkan usaha baik kesejahteraan social maupun ekonomi produktif dan juga bergerak dibidang olahraga, agama,kesenian dan budaya. Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 (Permendagri No.5 Tahun 2007), adalah suatu wadah dan ruang mengembangkan kreatifitas masyarakat, terutama pemuda yang memiliki kesadaran penuh serta memiliki tanggung jawab sebagai

mahluk sosial yang ada di desa atau kelurahan yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial di bawah pembinaan Departemen sosial.

Sedangkan Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.77/HUK/2010 (Permensos no.77 tahun 2010), merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang sosial untuk menjadi ruang dan tempat mengembangkan kreatifitas masyarakat, terutama pemuda yang memiliki kesadaran penuh serta memiliki tanggung jawab sebagai mahluk sosial yang ada di desa atau kelurahan yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan defenisi di atas, dapat dilihat bahwa karang taruna merupakan suatu organisasi pemuda yang berada ditingkat Desa atau Kelurahan sebagai wadah pengembangan potensi diri dalam bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, karang taruna berlandaskan pada Permensos No. 77/HUK/ tahun 2010 dimana telah mengatur semua struktur pengurus serta masa jabatan pada masing-masing wilayah dari Desa atau Kelurahan sampai dengan pada tingkat pusat. Pedoman ini adalah representatif untuk regenerasi organisasi masyarakat. Adapun untuk kelancaran dan kelanjutan dari organisasi baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dalam proses pembinaan telah di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Anggota Karang Taruna adalah pemuda yang telah berusia mulai 13 tahun – 45 tahun. Serta pengurus yang berusia mulai dari 17 tahun – 45 tahun. (Permensos No.77/HUK/ Tahun 2010).

Banyak yang dapat dilakukan oleh anggota karang taruna dimulai dari hal yang kecil agar bisa menjadi besar, seperti :

- a) Melatih kekompakan dalam berorganisasi dan sehat ajang silaturahmi.
- b) Mengadakan kegiatan kerja bakti dan penataan lingkungan.
- c) Menggalakan penanaman apotek hidup dan warung hidup.
- d) Mengadakan lomba hal-hal positif.
- e) Mengadakan sekolah tambahan.
- f) Mendirikan perpustakaan sederhana.

2. Tujuan dan Fungsi Karang Taruna

Tujuan dan fungsi dari Karang Taruna diatur dalam Permensos Nomor 77/HUK/2010 sebagai berikut :

a. Tujuan Karang Taruna

Karang Taruna bertujuan :

- a) Menumbuh kembangkan anggota masyarakat agar berkualitas, kreatif, inovatif, terampil, berkarakter dan cerdas serta ada kesadaran penuh yang dimiliki pemuda untuk mengatasi segala masalah yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab secara pribadi dan sosial.
- b) Mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara terarah, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan terutama pemuda.
- c) Menumbuh kembangkan usaha kreatif setiap masyarakat terutama pemuda agar menjadi mandiri.
- d) Adanya pengembangan kerjasama ataupun bermitra yang terarah serta berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan potensi dan kemampuan pemuda.

b. Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai fungsinya yaitu :

- a) Agar tidak terjadi masalah sosial dalam lingkungan masyarakat terutama pemuda.
- b) Melakukan kegiatan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama pemuda.
- c) Meningkatkan usaha kreatif agar ekonomi masyarakat meningkat secara produktif.
- d) Menanamkan, menumbuhkan, memelihara, memperkuat dan memperkuat kesadaran yang dimiliki masyarakat terutama pemuda agar berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
- e) Menumbuhkan, memelihara, memperkuat dan menjaga kearifan lokal.
- f) Memperkuat dan memelihara semangat kepemilikan terhadap Negara.

D. Pembinaan Karang Taruna

Dalam Permensos No.77/HUK/2010 pada bab VI pasal 14, Pembina karang taruna terdiri atas :

- a) Pembina Utama
- b) Pembina Umum
- c) Pembina Fungsional
- d) Pembina Teknis

Pembina Utama Karang Taruna yang dimaksud Pasal 14 huruf a) adalah Presiden Republik Indonesia.

Pembina Umum Karang Taruna yang dimaksud Pasal 14 huruf b) meliputi :

- a) Tingkat Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri.
- b) Tingkat Provinsi yaitu Gubernur.
- c) Tingkat Kabupaten atau Kota yaitu Bupati atau Walikota, Tingkat Kecamatan yaitu Camat.
- d) Tingkat Desa atau Kelurahan yaitu Kepala Desa atau Lurah.

Tugas Pembina Umum yang dimaksud adalah :

- a) Menteri Dalam Negeri, bertugas melakukan pembinaan umum berskala nasional, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaannya ke setiap Gubernur Provinsi.
- b) Gubernur, bertugas melakukan pembinaan umum di tingkat Provinsi serta melakukan pengukuhan kepengurusan FPKT Provinsi.
- c) Bupati atau Walikota, bertugas melakukan pembinaan umum di tingkat Kabupaten atau Kota serta melakukan pengukuhan kepengurusan FPKT Kabupaten atau Kota.
- d) Camat, bertugas melakukan pembinaan umum di tingkat Kecamatan serta melakukan pengukuhan kepengurusan FPKT Tingkat Kecamatan.
- e) Kepala Desa atau Lurah, bertugas melakukan pembinaan umum di tingkat desa atau kelurahan, serta melakukan pengukuhan kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan, dan juga memberikan fasilitas Karang Taruna di desa atau kelurahan dalam berkegiatan.

Pembina Fungsional yang dimaksud Pasal 14 huruf c) meliputi:

- a) Tingkat Pusat yaitu Menteri Sosial.
- b) Tingkat Provinsi yaitu Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- c) Tingkat Kabupaten atau Kota yaitu Kepala Instansi Sosial Kabupaten atau Kota.
- d) Tingkat Kecamatan yaitu Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Kecamatan.

Tugas dari Pembina Fungsional adalah :

- a) Pembinaan secara fungsional.
- b) Melakukan bimbingan keorganisasian Karang Taruna.
- c) Melakukan program kerja dan kegiatan sebagai bentuk pembinaan kepada Karang Taruna agar bisa berkembang dan berdaya sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial di desa atau kelurahan.
- d) secara fungsional dalam melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi sampai Nasional.

Pembina Teknis yang dimaksud Pasal 14 huruf d) meliputi :

- a) Tingkat Pusat yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- b) Tingkat Provinsi yaitu Instansi atau Dinas Terkait tingkat Provinsi.
- c) Tingkat Kabupaten atau Kota yaitu Instansi atau Dinas terkait tingkat Kabupaten atau Kota.

Pembinaan secara teknis bertugas memfasilitasi, memberikan bimbingan secara berkelanjutan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas

pokok serta fungsinya dalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan kondisi masing-masing Karang Taruna.

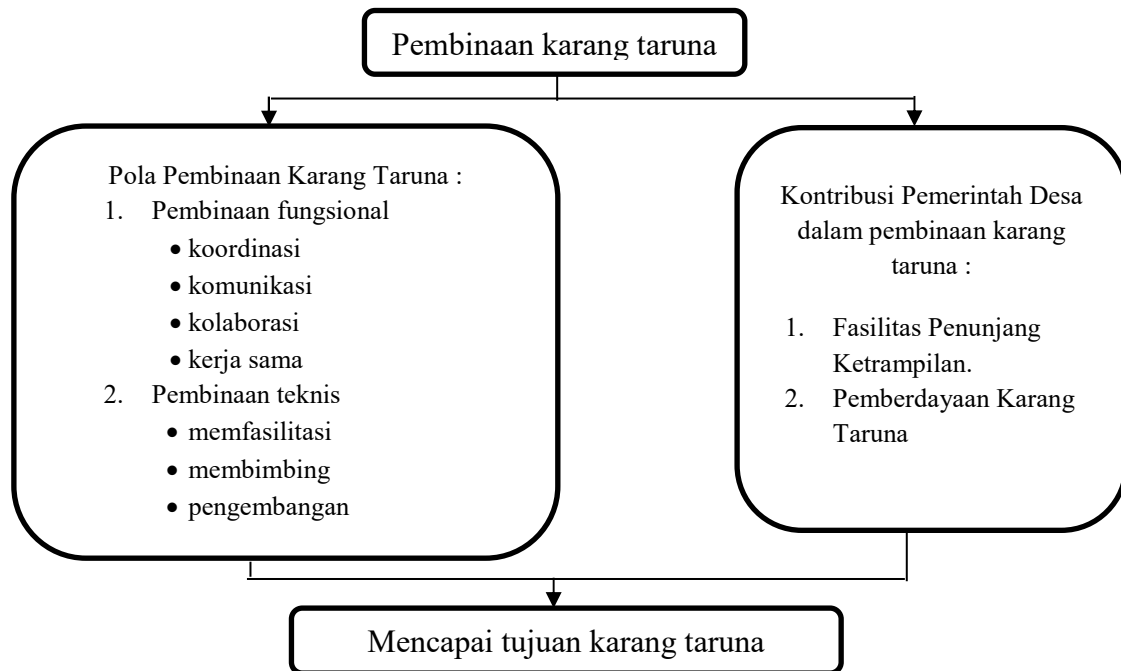
E. Kerangka Fikir

Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara melakukan pembinaan, perubahan kearah lebih baik, adanya usaha dan tindakan yang dilakukan yang memiliki daya guna melalui kegiatan agar menghasilkan daya guna yang baik. pembinaan merupakan suatu proses dan juga tujuan. Sebagai proses, pembinaan secara kelompok di dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk setiap orang atau pemuda yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan masyarakat harus menunjuk pada hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya guna. Adanya kekuasaan serta pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemenuhan dalam segala aspek kehidupam baik yang bersifat fisik, sosial, maupun ekonomi seperti adanya kepercayaan diri yang tinggi, bisa menyampaikan segala aspirasinya, mempunyai mata pencaharian menetap, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Dengan demikian, pembinaan Karang Taruna dapat diartikan sebagai suatu proses pembaharuan dan pengembangan sumber daya manusia di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembinaan Karang taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone terbagi atas :

(1) Pembinaan fungsional, dan (2) pembinaan teknis

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : (1) Pola pembinaan Karang Taruna, berdasarkan Permensos No.77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna membagi pembinaan secara fungsional yaitu melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan kerja sama, serta pembinaan secara teknis yaitu pembinaan yang dilakukan untuk memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program kerja dan (2) kontribusi Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna dengan cara memeberikan fasilitas penunjang keterampilan dan melakukan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

G. Defenisi Fokus Penelitian

1. Koordinasi yang dilakukan FPKT Kecamatan Patimpeng bersama dengan Kasi PAD sekaligus Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Patimpeng untuk melakukan pengorganisasian terhadap Karang Taruna Desa.
2. Komunikasi antara Ketua Karang Taruna Desa Batulappa dengan anggota serta FPKT Kecamatan Patimpeng untuk meningkatkan pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
3. Kolaborasi dengan melakukan hubungan timbal balik antara Pemerintah Desa Batulappa dengan Ketua Umum Karang Taruna Desa Batulappa untuk meningkatkan kreatifitas agar masyarakat bisa menjadi mandiri dalam kehidupannya.
4. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Desa Batulappa dengan FPKT Kecamatan Patimpeng untuk membina dan mengembangkan Karang Taruna Desa agar tercapai fungsi Karang taruna.
5. Pemerintah Desa Batulappa dan Kasi PAD Kecamatan Patimpeng sebagai mitra Karang Taruna Desa untuk memfasilitasi sarana dan prasarana agar dapat melakukan pembinaan secara baik.
6. FPKT Kecamatan Patimpeng dan Karang Taruna Desa Batulappa melakukan bimbingan agar dapat melakukan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat sehingga bisa mengelolah pontensi dan sumber daya yang ada.
7. Pengembangan anggota yang harus dilakukan oleh Karang taruna Desa Batulappa dengan FPKT Kecamatan Patimpeng agar dalam pembinaan tidak terjadi kesenjangan.

8. Fasilitas penunjang keterampilan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Batulappa berupa sarana olahraga agar Karang Taruna bisa mengembangkan potensi yang di miliki masyarakat.
9. Pemberdayaan Karang Taruna yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batulappa dengan FPKT Kecamatan Patimpeng yang berkesinambungan agar bisa melakukan pembinaan ke masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan Karang Taruna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng dan Kantor kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada Karang Taruna sebagai wadah yang bergerak di bidang peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat Desa atau Kelurahan yang bertujuan dalam melakukan proses pembinaan agar masyarakat terutama pemuda dapat berdaya guna yang ada dalam suatu desa atau wilayah itu sendiri, serta di tingkat Kecamatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan secara fungsional.

B. Jenis dan Tipe Penelitian Kualitatif

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan pembinaan Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti tentang pembinaan Karang taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh yakni mengenai pembinaan karang taruna serta upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembinaan Karang taruna serta data-data penunjang lainnya yang melengkapi dalam penyusunan penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data penunjang yang dikelola peneliti dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Informan	Jumlah
1	Bachri Ahmad, SE	BA	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kec. Patimpeng	1 Orang
2	Haeruddin Mallanti	HM	Kepala Desa batulappa Kec. Patimpeng Kab. Bone	1 Orang
3	A.Adhar, ST	AA	Ketua umum FPKT Kec. Patimpeng Kab. Bone	1 Orang
4	A.Haris	AH	Ketua umum Karang taruna	1 Orang
5	Awal Ramadhan	AR	Pengurus Karang taruna	1 Orang
6	Suyuti Awal	SA	Pengurus Karang taruna	1 Orang
7	Ihsan Abadi	IA	Masyarakat	1 Orang
8	Agus Wisman	AW	Masyarakat	1 Orang
9	Sunardi	Sn	Masyarakat	1 Orang
Total Informan				9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan sasaran riset, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*), pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai proses pembinaan atau pembaharuan yang dilaksanakan Karang Taruna serta upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan pola pembinaan karang taruna.
2. Wawancara (*interview*), peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu Kepala seksi kesejahteraan Sosial, Kepala Desa, Ketua Umum Karang taruna dan pengurus karang Taruna sebanyak 2 orang, serta masyarakat sebanyak 3 orang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai pembinaan Karang Taruna di Desa batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten bone.
3. Dokumentasi, dokumentasi ialah meliputi data-data pembinaan dari seksi kesejahteraan sosial di kantor Kecamatan patimpeng, Kepala Desa, Karang taruna itu sendiri, serta masyarakat sebagai elemen terpenting dalam terbentuknya Karang taruna.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikelola dan digunakan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga)

komponen pokok dalam buku Sugiyono (2012). Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Banyaknya bukti yang didapatkan di lokasi, sehingga perlu untuk dianalisa dengan baik dan teliti. Seperti telah dikemukakan, sehingga dalam penelitian yang semakin lama data yang didapatkan di lapangan juga semakin banyak dan rumit. Sehingga reduksi data sangat diperlukan untuk melakukan analisis data. Mereduksi data artinya melakukan pemilaaan terhadap masalah yang di temukan di lapangan dengan memilih hal-hal penting untuk dirangkum dan dikelola.

2. Penyajian Data (*data display*)

Secara umum dalam penelitian, penyajian data dapat dibuat dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan satu sama lain, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dimaksud dalam analisis data ini adalah kesimpulan yang ditemukan di lapangan. Adapun kesimpulan yang ditemukan pertama hanyalah sementara. Kesimpulan itu dapat berubah ketika dalam pengumpulan data selanjutnya menemukan data baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi jika data selanjutnya yang didapatkan di lapangan mendukung data awal dan tetap konsisten, maka kesimpulan pertama merupakan kesimpulan kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012), Triangulasi adalah

proses pemeriksaan data yang ditemukan dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam:

1. Triangulasi Sumber, adalah melakukan pemeriksaan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan serta menguji data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Setelah itu, peneliti melakukan perbandingan antara hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara, juga membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang didapatkan.
2. Triangulasi Teknik, adalah melakukan pemeriksaan data pada basis serupa tetapi cara yang berbeda. Kemudian bukti yang didapatkan dari wawancara, kemudian dicek melalui pengamatan dan dokumen. Jika data yang didapatkan berbeda antara pengamatan, wawancara dan dokumen, maka dilakukan wawancara lebih lanjut baik basis serupa maupun basis berbeda. Agar dapat mengambil kesimpulan data yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu, adalah melakukan pemeriksaan bukti dilain waktu dalam satu sumber secara berulang. Kredibilitas data sangat berpengaruh pada waktu melakukan penelitian. Bukti yang diperoleh dipagi hari akan jauh berbeda dengan data yang didapatkan pada sore atau malam hari. Pada pagi hari narasumber masih dalam keadaan segar belum bersentuhan dengan masalah pekerjaan sehingga data yang diberikan sah sehingga dapat dipercaya. Namun bukti yang diperoleh dari narasumber pada sore hari kadang sudah tidak kredibel lagi karena ada faktor capek, banyak masalah,

dan lain-lain yang dirasakan narasumber. Sehingga dalam menguji kredibilitas data bisa dilakukan melalui cara pengecekan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen di waktu yang berbeda-beda. Jika bukti yang diperoleh tidak sama, maka penelitian dilakukan berulang kali sampai didapatkan data yang pasti atau melakukan pengecekan dari hasil penelitian sebelumnya yang telah melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Batulappa salah satu Desa yang ada di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Desa Batulappa 9,5 km². Desa Batulappa terdiri dari 4 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 8 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas Desa Batulappa bila dilihat dari letak geografisnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Massila

Sebelah Selatan : Balle

Sebelah Barat : Masago

Sebelah Timur : Latellang

2. Jumlah Penduduk

Data statistik Desa Batulappa tahun 2017 mencatat, penduduk Desa Batulappa berjumlah 2120 jiwa. Dari tabel dibawah ini disajikan data mengenai jumlah penduduk Desa Batulappa berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Batulappa Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
LAKI – LAKI	1085 Jiwa	51,18 %
PEREMPUAN	1035 Jiwa	48,82 %
JUMLAH	2120 Jiwa	100 %

Sumber : Data Kependudukan Desa Batulappa

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk laki-laki di Desa Batulappa lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu 51, 18% penduduk laki-laki dan 48, 82 % penduduk perempuan.

Untuk mengetahui jumlah penduduk di Desa Batulappa berdasarkan umurnya, di bawah ini akan disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Batulappa Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa
1	0 - 15 Tahun	487
2	15 - 65 Tahun	1.187
3	65 Tahun Ke atas	354
	Jumlah	2.028

Sumber : Data Kependudukan Desa Batulappa

3. Tingkat Ekonomi

Di bidang ekonomi, masyarakat Desa Batulappa mayoritas masyarakatnya adalah petani. Namun, masyarakatnya bisa dikatakan rata-rata berkecukupan. Hal ini terbukti hampir di setiap rumah rata-rata memiliki kendaraan bermotor, ada pula yang memiliki kendaraan mobil. Berikut ini disajikan tabel penduduk Desa Batulappa berdasarkan jenis pekerjaannya.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Batulappa

No	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	PNS	22
2	Swasta	1
3	Wiraswasta/ Pedagang	53
4	Tani	422
5	Pensiunan	4
6	Jasa	1
7	Lain-Lain	8
	Jumlah	511

Sumber : Data Kependudukan Desa Batulappa

4. Tujuan dan Fungsi Karang Taruna

Tujuan dan fungsi dari Karang Taruna diatur dalam Permensos Nomor 77/HUK/2010 sebagai berikut :

1. Tujuan Karang Taruna

Karang Taruna bertujuan :

- a) Menumbuh kembangkan anggota masyarakat agar berkualitas, kreatif, inovatif, terampil, berkarakter dan cerdas serta ada kesadaran penuh yang dimiliki pemuda untuk mengatasi segala masalah yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab secara pribadi dan sosial.
- b) Mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara terarah, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan terutama pemuda.
- c) Menumbuh kembangkan usaha kreatif setiap masyarakat terutama pemuda agar menjadi mandiri.
- d) Adanya pengembangan kerjasama ataupun bermitra yang terarah serta berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan potensi dan kemampuan pemuda.

2. Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai fungsinya yaitu :

- a) Agar tidak terjadi masalah sosial dalam lingkungan masyarakat terutama pemuda.
- b) Melakukan kegiatan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama pemuda.

- c) Meningkatkan usaha kreatif agar ekonomi masyarakat meningkat secara produktif.
- d) Menanamkan, menumbuhkan, memelihara, memperkuat dan memperkuat kesadaran yang dimiliki masyarakat terutama pemuda agar berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
- e) Menumbuhkan, memelihara, memperkuat dan menjaga kearifan lokal.
- f) Memperkuat dan memelihara semangat kepemilikan terhadap Negara.

5. Sejarah Berdirinya Karang Taruna Di Desa Batulappa

Sejarah perkembangan Karang Taruna dalam perjalanannya melalui proses yang panjang. Karang Taruna di Desa Batulappa berdiri pada tahun 2015. Dengan melalui musyawarah antara pemuda dengan pemerintah setempat, maka terbentuklah suatu wadah organisasi kepemudaan yang di beri nama Karang Taruna dengan harapan bahwa pemuda bisa menjadi pemuda yang berkualitas dan komitmen yang besar kepada Desa Batulappa khususnya dan negara pada umumnya. Namun Karang Taruna saat ini masih terlalu asing di telinga masyarakat. Belum banyak yang mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi dari Karang Taruna. Bukanlah suatu organisasi jika tidak memiliki masalah, begitupun dengan Karang Taruna. Di umur yang masih terbilang baru ini memiliki tantangan yang cukup besar untuk mengembangkan dan menjalankan Karang Taruna sebagaimana sesuai dengan visi misi serta tugas dan fungsi dari Karang Taruna. Di awal berdirinya, Karang Taruna hampir sempat hilang bagaikan ditelan bumi, di karenakan tidak adanya dana yang bisa di kelolah untuk membangun Karang Taruna. Sementara

FPKT sebagai naungan di tingkat Kecamatan juga sempat Vacuum hampir 2 tahun. Baru kembali aktif setelah pengukuhan pengurus baru di akhir 2017 ini. Dengan aktifnya kembali FPKT Kecamatan, membawakan angin segar untuk Karang Taruna Di Desa Batulappa agar bisa kembali bersatu padu membangun, membina, dan memberdayakan pemuda di desa Batulappa. Dengan semangat Loyalitas dan sosial tinggi membentuk Karang Taruna menjadi organisasi yang tangguh dan bisa di kenal dilapisan masyarakat baik lingkungan desa khususnya hingga kota pada umumnya.

6. Visi dan Misi Karang Taruna Di Desa Batulappa

1. Visi Karang Taruna Di Desa Batulappa

Peningkatan kualitas sumber daya pemuda menuju sebuah kemajuan yang selaras melalui Karang Taruna. Menumbuhkan inspirasi untuk berkreasi bagi pemuda demi mempererat hubungan melalui solidaritas sebagai mitra organisasi, baik kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas serta kemampuan dibidang Kesejahteraan Sosial.

2. Misi Karang Taruna Di Desa Batulappa

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda melalui Karang Taruna.
- b) Mengembangkan kreativitas generasi muda untuk menjalin persaudaraan.
- c) Meningkatkan tanggung jawab sosial Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

7. Struktur Organisasi Karang Taruna Di Desa Batulappa

STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA
DESA BATULAPPA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE
MASA BAKTI 2015 – 2018

A. PELINDUNG

1. Kepala Desa Batulappa
2. Ketua BPD Desa Batulappa

B. PEMBIMBING TEKHNIS

1. Hendra Asmar
2. Basharis
3. A. Adli Nur
4. A. Muh. Nur

C. PENGURUS

I. PENGURUS HARIAN

Ketua	: A. Haris
Wakil Ketua	: Awal Ramadhan
Sekretaris	: A. Zaenal Abidin
Bendahara	: Andi Adhar

II. SEKSI-SEKSI

A. Seksi Usaha Produktif Pemuda dan Koperasi

Koordinator : Asrul Rustang

Anggota : Salamin

Aslam

Suyuti Awal

B. Seksi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Lingkungan

Koordinator : Hikmawaty

Anggota : Eko Budianto

Harfidal

A.Yaslina

C. Seksi Olah Raga, Seni dan Budaya

Koordinator : A. Muh. Akis

Anggota : Gusman

Sri Wahyuni

D. Seksi Kerohanian dan Pemberdayaan Perempuan

Koordinator : Mega Aulia

Anggota : A. Muhlis

Muliadi

A.Nurman

E. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kamaruddin

Anggota : Herman

Bahtiar

Risma

8. Program Kerja Karang Taruna Di Desa Batulappa

Setiap Karang Taruna berkewajiban dalam memutuskan rancangan kegiatan berlandaskan regulasi Karang Taruna setempat. Rancangan kegiatan Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama pemuda, pemantapan organisasi, pengembangan daya kesejahteraan sosial, bisnis efisien produktif, olahraga, kesenian dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kondisi Karang Taruna.

a. Program Kerja Umum

Program kerja umum adalah rancangan kegiatan Karang Taruna Desa Batulappa yang dilaksanakan secara umum di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone antara lain meliputi :

Tabel 5. Program Kerja Umum Karang Taruna di Desa Batulappa

Jenis Program	Tempat Pelaksanaan	Waktu
Rapat Pleno Pengurus	Sekretariat	Minimal 1 Bulan 1 kali
Rapat Pemuda Desa	Balai Desa	Kondisional

Sumber : Program Kerja Desa Batulappa

b. Program Kerja Bidang

a. Seksi Usaha Produktif Pemuda dan Koperasi

a) Pengembangan kerajinan tradisional masyarakat di Desa Batulappa.

- b) Pembentukan koperasi Karang Taruna bekerja sama dengan BUMDes.
 - c) Pengelolaan hasil tani masyarakat di Desa Batulappa.
2. Seksi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Lingkungan
- a) Melaksanakan kebersihan lingkungan.
 - b) Melaksanakan bakti sosial paling tidak 1 kali sebulan.
 - c) Penggunaan tanah kosong sekeliling rumah.
3. Seksi Olah Raga, Seni, dan Budaya
- a) Peningkatan olah raga secara teratur di Desa Batulappa.
 - b) Pembentukan tim olah raga, seperti : Sepak bola dan bola volley.
 - c) Penyelenggaraan agenda rutin perlombaan olah raga dan seni budaya.
 - d) Pembentukan seni budaya yang ada di Desa Batulappa.
4. Seksi Kerohanian dan Pemberdayaan Perempuan
- a) Melaksanakan pengajian teratur dan ceramah agama.
 - b) Pembentukan pengajian Karang Taruna.
 - c) Pembentukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) pemuda Karang Taruna.
 - d) Sosialisasi dampak penyalahgunaan narkoba dan seks bebas, bekerja sama dengan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan setempat.
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- a) Menjaga hubungan harmonis Karang Taruna dengan masyarakat.
 - b) Pembentukan pos kambling.
 - c) Melakukan patrol berkala bekerja sama dengan kepolisian.

B. Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa

1. Pembinaan Fungsional

Pembinaan secara fungsional yang dimaksud adalah di dalam pelaksanaan ada fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuannya.

a. Koordinasi

Koordinasi secara umum adalah mengimbangkan dan menyesuaikan kegiatan dari satu golongan dengan yang lainnya untuk memperoleh sasaran tiap-tiap pihak dan berakhir dengan tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa terkait dengan koordinasi dengan FPKT Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, mengatakan bahwa :

“ Kesra tidak pernah berkaitan dengan Karang Taruna di Sini, sementara FPKT Kecamatan yang lebih sering melakukan koordinasi dan melakukan rapat bahkan dilakukan dengan 3 Kecamatan yaitu Patimpeng, Kahu dan Bontocani.“ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kesra tidak pernah melakukan koordinasi ke Karang Taruna Di Desa Batulappa sementara yang sering melakukan koordinasi adalah Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan. Bukan hanya melakukan fungsi koordinasi, FPKT juga sering melakukan rapat dengan pengurus Karang Taruna bahkan dilakukan dengan 3 Kecamatan sekaligus.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua umum FPKT Kecamatan, mengatakan bahwa :

“Jadi untuk mempermudah jalur koordinasinya, kita yang di Kecamatan mengakomodir juga teman-teman ada beberapa dari pengurus desa kita

masukkan juga pengurus kecamatan, itupun kalo bukan pengurus di Desa setidaknya berkecimpung atau aparat Desa lah kita ambil toh untuk pengurus Karang Taruna Kecamatan, jadi kalo ada rapat atau pemberitahuan lainnya lebih mudah jalur koordinasinya karena sudah ada di tiap Desa yang langsung sampaikan. Untuk koordinasi dengan Kesra belum ada baru hanya sebatas penyampaian karena kitakan masih baru, bulan kemarin saja baru dilantik. Tapi insha Allah untuk kedepannya pasti juga kita akan berkoordinasi dengan Kesra dan berpartisipasi dalam kegiatannya” (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan telah melakukan fungsi koordinasi sesuai dengan Permensos No. 77/ HUK/ 2010 pasal Bab V Pasal 12 ayat 2. Dalam mempermudah jalur koordinasinya, FPKT mengambil pengurus dari pengurus Karang Taruna Desa ataupun Aparat Desa agar ketika ada rapat atau pemberitahuan lainnya cepat sampai ke setiap Desa. Sementara untuk koordinasi dengan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan belum ada baru sebatas penyampaian karena FPKT Kecamatan ini baru dilantik. Tapi ada harapan bahwa akan melakukan koordinasi dan berpartisipasi dalam kegiatan Kesra Kecamatan kedepannya.

Lebih lanjut wawancara dilakukan dengan Kasi PAD Sekaligus Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Patimpeng, terkait dengan tugasnya melakukan fungsi koordinasi dengan FPKT Kecamatan dan Karang Taruna di Desa, mengatakan bahwa :

“ Nda pernah ada koordinasi dengan Karang Taruna baik itu Kecamatan maupun Desa, karena mereka tidak pernah ada melapor kalo ada Karang Taruna disitu terbentuk hanya sebatas dengar saja info” (Hasil wawancara BA, 16 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Patimpeng tidak pernah melakukan fungsi koordinasi dengan FPKT Kecamatan maupun dengan Karang Taruna Desa

dikarenakan tidak adanya laporan terbentuknya Karang Taruna secara administratif baik dari Karang Taruna Kecamatan maupun Desa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa tidak ada fungsi koordinasi yang terjadi dari Kasi PAD sekaligus Kesejahteraan Rakyat Kecamatan dengan FPKT Kecamatan dan Karang Taruna Desa, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan secara administratif masuk ke Kasi Kesejahteraan Rakyat terkait dengan adanya pembentukan dan keberadaan Karang Taruna tersebut. Sementara dalam Permensos Nomor 77/HUK/2010 pada Pasal 17 Ayat 1 Poin (d) dijelaskan bahwa pembina fungsional di Tingkat Kecamatan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan. Jadi seharusnya memang bukan hanya sekedar pemberitahuan bahwa ada Karang Taruna terbentuk tetapi lebih kepada bukti administratif sebagai validitas data. Namun untuk koordinasi FPKT Kecamatan dengan Karang Taruna Desa cukup baik dengan biasa melakukan rapat bersama serta melakukan kegiatan bersama. Walaupun sudah baik koordinasi dengan FPKT Kecamatan, bukti administratif yang harus dibenahi terlebih dahulu dari Karang Taruna agar dalam melaksanakan rancangannya ada koordinasi yang terbangun juga dari pemerintah Kecamatan supaya bisa saling membantu untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Komunikasi

Dalam sebuah organisasi, komunikasi sangatlah penting untuk melaksanakan setiap program kerja serta menjalankan roda organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT)

Kecamatan Patimpeng terkait dengan komunikasi dengan Kesra Kecamatan Patimpeng dan Karang Taruna Desa, mengatakan bahwa :

“ Jujur untuk kepengurusan saya ini ndi’ baru ya baru kemarin, tahun ini kita di kukuhkan oleh Pak Bupati ya bulan lalu, jadi ya pelan-pelanlah sudah ada komunikasi tapi belum intens baru hanya sebatas penyampaian saja dan awal tahun ada kegiatan Kesra kita mau terlibat disitu. Untuk komunikasi di Karang Taruna Desa kitakan sudah ambil tiap Desa 2 orang untuk masuk ke pengurus Kecamatan, jadi ada komunikasi akan lebih mudah serta dalam menyampaikan informasi lebih mudah juga.“ (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan belum baik hubungan komunikasinya dengan Kesra Kecamatan dikarenakan bahwa kepengurusan FPKT Kecamatan baru terbentuk. Padahal dalam pembinaan Karang Taruna Desa keduanya harus memiliki hubungan komunikasi yang baik. Namun, untuk komunikasi ke Karang Taruna Desa bisa dikatakan justru lebih baik dengan adanya pengurus yang di ambil dari tiap-tiap Desa sebagai jalur mempermudah komunikasi.

Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa, mengatakan bahwa :

“ Komunikasi kita dengan intens kalau dengan pengurus Kecamatan apalagikan Ketua Karang Taruna Kecamatan satu Desa jadi sering ketemu dan bincang-bincang mengenai karang taruna dan untuk komunikasi dengan anggota berjalan lancar karena kita beberapa kali juga melakukan rapat untuk membahas apa-apa yang akan kita mau jalankan.“ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa dalam menjalankan roda kepengurusan Karang Taruna memiliki komunikasi yang cukup

baik antara Karang Taruna Desa dengan FPKT Kecamatan begitupun komunikasi dengan anggotanya.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota Karang Taruna terkait komunikasi antara Ketua Karang Taruna Di Desa Batulappa dengan anggotanya, mengatakan bahwa :

“ Sebenarnya saya juga baru tau kalo saya masuk pengurus adapi SK di kasikanka, tidak ada info sebelumnya saya dapatkan dan tidak pernah ada komunikasi masuk jadi saya tidak tau apa yang saya mau lakukan, jadi itumi nda pernahka juga ikut kalo ada rapatnya atau sebagainya.“ (Hasil wawancara AR, 18 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa ada miskomunikasi yang terjadi antara Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa dengan pengurusnya. Ini sangat mengganggu dalam sebuah organisasi ketika ada kejadian yang seperti ini yang bisa menghambat jalannya organisasi.

Berdasarkan hasil obsevasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa komunikasi dalam organisasi sangatlah penting. Dalam sebuah organisasi, semua saling membutuhkan dan saling berkomunikasi baik dengan rekan kerjanya maupun dengan lingkungannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Don Hellriegel, (dalam Yayat Hayati, 2015:56) mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses dimana fungsi-fungsi manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Metode komunikasi bisa jadi para manajer melaksanakan tugas dan kewajibannya. Informasi harus dikomunikasikan kepada pimpinan agar ada rancangan yang dimiliki untuk melakukan perencanaan, rencana harus dikomunikasikan kepada yang lain supaya biadijalankan. Disini dapat dilihat bahwa komunikasi yang

dilakukan dalam melakukan pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa belum maksimal. Baik itu antara Kesra Kecamatan dengan FPKT Kecamatan maupun antara Ketua Umum Karang Taruna dengan anggotanya. Sementara untuk meningkatkan kinerja dan melakukan proses pembinaan yang berkelanjutan dibutuhkan komunikasi yang lebih apalagi tergolong masih baru. Jadi perlu ada pengevaluasian di internal dan eksternal supaya proses organisasi bisa terlaksana dengan baik.

c. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan ikatan bolak balik satu orang dengan orang lain atau antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama serta melahirkan saling percaya dan tanggung jawab antara kedua kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa terkait dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Karang Taruna selaku pelindung organisasi di tingkat Desa, mengatakan bahwa :

“Kita selalu berhubungan Karang Taruna Desa karena kan itu merupakan tanggung jawab kami selaku Pemerintah Desa untuk terus memberikan dorongan dan motivasi untuk menjalankan program kerjanya terutama untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terutama pemudanya.” (Hasil wawancara HM, 14 Desember 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa selaku pemimpin tertinggi di Tingkat Desa dan merupakan pelindung organisasi Karang Taruna di Tingkat Desa menjalankan tanggung jawabnya untuk selalu ada kepada Karang Taruna dengan memberikan dorongan serta motivasi untuk menjalankan program kerja dari Karang taruna itu sendiri.

Senada juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Ya Pemerintah Desa dalam hal ini Petta Desa sangat membantu dalam proses pengembangan Karang Taruna ini sendiri karena kan kita masih terbilang cukup baru juga jadi masih banyak yang perlu dibenahi di dalamnya dan Petta Desa selalu memberikan support dan motivasi untuk terus bergerak, tapi untuk bersentuhan dengan masyarakat belum ada kami lakukan secara luas.“ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Karang Taruna Di Desa Batulappa cukup baik perhatian yang diberikan dari Pemerintah Desa (Kepala Desa) yang terus memberikan dukungan moril berupa motivasi dalam mengembangkan Karang Taruna yang masih baru itu. Namun kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung belum ada yang dilakukan oleh Karang Taruna yang seharusnya menjadi prioritasnya dalam melakukan pemberdayaan di daerahnya tersebut.

Berlanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat dalam hal ini pemuda di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng ini, mengatakan bahwa :

“ Tidak ada sama sekali kegiatan yang dilakukan oleh apa tadi itu ya Karang Taruna, saya juga tidak tau apa itu Karang Taruna ku kira itu adalah semacam lembaga sayap partai yang ada di Desa, biasa saya lihat itu logonya di Kantor Desa kalo lewatka tapi tidak ku tauki apa itu.“ (Hasil wawancara IA, 17 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat masih terlalu asing dengan kehadiran Karang Taruna itu sendiri, bahkan persepsi masyarakat justru jauh berbeda dengan tugas dan fungsi Karang Taruna yang seharusnya hadir untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap

masyarakat terutama pemuda itu sendiri. sehingga wajar ketika masyarakat belum merasakan kehadiran dari Karang Taruna itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa Karang Taruna dalam menjalankan fungsi dan tugasnya belum efektif, terlihat jelas masyarakat belum merasakan kehadiran dari Karang Taruna itu sendiri sehingga untuk tersentuh dan turut andil dalam kegiatan Karang Taruna tidak ada sumbangsi dari masyarakat. Karang Taruna harus berbenah karena besar dukungan support dan motivasi dari Pemerintah Desa (Kepala Desa) yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Karang Taruna harus terus berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat merasakan keberadaan dari Karang Taruna itu sendiri.

d. Kerja Sama

Dalam sebuah organisasi, kerja sama sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Karena tanpa ada kerja sama yang baik akan menjadikan program kerja terhambat dan terbengkal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Ya Ananda kita akan terus melakukan kerja sama dengan Karang Taruna ketika ada program kerjanya yang mau dilaksanakan, kerja sama dalam bentuk dana kitapun akan berikan kepada Karang Taruna. Namun harus ada pemberitahuan sebelumnya ketika akan melakukan program kerjanya supaya bisa dimasukkan dalam RPJMDes (Rencana Program Jangka Menengah Desa) baru RKP (Rencana Kerja Pembangunan) itulah dituangkan dalam bentuk APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), makanya apa yang ingin dilakukan Karang Taruna ini 2018 katakanlah apa yang ingin dilakukan disamping kita juga carikan bantuan yang lain.” (Hasil wawancara HM, 14 Desember 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa (Kepala Desa) akan terus bekerja sama dengan Karang Taruna untuk melakukan program kerjanya berupa dana untuk memperlancar kegiatannya. Namun tidak serta merta langsung diberikan dana harus ada pemberitahuan sebelumnya ketika MUSRENBANG bisa dimasukkan dalam RPJMDes (Rencana Program Jangka Menengah Desa) kemudian masuk RKP (Rencana Kerja Pembangunan) lalu dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Pernah saya rapat dengan pengurus membahas banyak hal sebenarnya tapi kita terkendala oleh anggaran bukannya ada tapi memang tidak ada tahun ini. Makanya di tahun 2018 nanti kita sudah rancang lagi anggarannya itu bersumber dari Anggaran Dana Desa untuk menjalankan program kerja dan pasti kita akan tingkatkan itu sambil kita akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Karang Taruna Kecamatan.” (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa yang menjadikan Karang Taruna tidak bisa menjalankan program kerjanya dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah Desa itu sendiri. Tetapi untuk 2018 telah dipersiapkan untuk rancangan dananya agar bisa lebih meningkatkan kinerja serta menjalankan program kerjanya sambil terus melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Desa dan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan.

Berlanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Forum Pengurus Karang Taruna (FPKM) Kecamatan Patimpeng mengenai kerjasama yang dilakukan dengan Karang Taruna, mengatakan bahwa :

“ Untuk saat ini kita belum melaksanakan kerjasama dengan Karang Taruna Desa dikarenakan kita baru terbentuk dan untuk kegiatan Karang Taruna Desa itu bisa didanai oleh Pemerintah Desa melalui jalur pemberdayaan pada saat MUSRENBANG Desa toh Karang Taruna bisa memasukkan usulan-usulan kegiatan yang bisa dibiayai oleh Dana Desa dengan ketentuan-ketentuan tertentu dari Kepala Desa, tetapi dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan program inovasi Desa kegiatan Temu Pattaungeng yang kita bekerjasama dengan Karang Taruna Desa dan Pemerintah Desa.” (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan belum ada kerjasama yang dilakukan dengan Karang Taruna Desa karena baru terbentuk. Tetapi akan bekerja sama dengan Karang Taruna Desa dan Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan dalam waktu dekat. Serta memberikan penjelasan mengenai jalur untuk mendapatkan dana kegiatan dari Karang Taruna Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam sebuah organisasi ditentukan oleh kerja sama tim yang baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi, baik itu kerjasama dengan internal maupun eksternal. Namun kerja sama tidak akan terbentuk jika tidak ada komunikasi yang baik dari setiap elemen yang terkait. Disini terlihat jelas bahwa adanya komunikasi yang kurang antara Ketua Karang Taruna Desa dengan Pemerintah Desa sehingga tidak adanya dana yang diberikan padahal Pemerintah Desa terbuka jika memang jauh sebelumnya sudah memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Karang Taruna Desa tersebut. Serta belum adanya juga kerja sama yang dilakukan antara Karang Taruna Desa dengan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan bukan karena komunikasi yang kurang melainkan karena masih barunya terbentuk. Maka

itu Karang Taruna Desa harus mengevaluasi diri untuk terus berbenah agar kedepannya dapat menjalankan program kerjanya dengan terus bekerja sama dengan setiap elemen yang terkait.

2. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud adalah memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program kerjanya.

a. Memfasilitasi

Fasilitas merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan fungsi dalam sebuah organisasi. Sehingga diperlukan adanya yang bisa memfasilitasi untuk pencapaian tugas dan fungsi dari organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Ya kalo fasilitas yang berikan kepada karang taruna, kita telah memberikan satu gedung untuk dijadikan sebagai sekretariat agar bisa mempermudah segala aktifitas dalam menjalankan kesehariannya, serta kita juga sudah sediakan satu lapangan bola volly untuk digunakan agar masyarakat dapat melakukan aktifitas di sore hari nantinya dan ketika mau lakukan pertandingan dan sebagai macam. “ (Hasil wawancara HM, 14 Desember 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng telah memfasilitasi Karang Taruna satu gedung sebagai sekretariat agar dalam menjalankan roda organisasi bisa lebih mudah lagi. Serta lapangan bola volly untuk pengembangan minat dan bakat pemuda di bidang olahraga.

Lanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Untuk sekretariat memang Petta Desa telah memberikan satu tempat sementara agar bisa lebih mudah jalannya ini Karang Taruna, tapi kita juga tidak bisa apa-apa kalau hanya ruang kosong tidak ada isi didalamnya, terutama untuk administrasi belum ada komputer khusus menyimpan data penting Karang Taruna itu sendiri, itupun data-data kita masih simpan di komputer Kantor Desa juga, kalau lapangan volly jg ya kita sudah gunakan untuk kegiatan sore hari dan kita rencana akan lakukan pertandingan nantinya disana.“(Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng membenarkan adanya fasilitas berupa satu gedung untuk dijadikan sekretariat Karang Taruna. Namun belum sepenuhnya puas dengan fasilitas tersebut dikarenakan butuhnya juga fasilitas administrasi berupa komputer sebagai tempat menyimpan segala arsip dan data Karang Taruna itu sendiri agar tidak lagi tercecer. Serta untuk fasilitas lapangan bola volly telah digunakan untuk latihan oleh pemuda setempat dan kedepannya Karang Taruna akan melakukan pertandingan bola volly.

Berlanjut dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi PAD sekaligus Kesejahteraan Rakyat Kecamatan patimpeng, mengungkapkan bahwa :

“ Tidak ada fasilitas yang kita berikan karena bagaimana caranya bisa difasilitasi kalo keberadaannya tidak ada laporan masuk ke kantor secara administrasi, ya kita tahu ada karang taruna tapi tidak ada bukti secara tertulis masuk, sementara kita tidak mungkin memberikan apa-apa ketika tidak ada bukti tertulis. “ (Hasil wawancara BA, 16 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kasi PAD sekaligus Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Patimpeng tidak memfasilitasi Karang Taruna karena tidak adanya laporan secara administrasi dari Karang Taruna itu sendiri. Sehingga untuk memfasilitasi Karang Taruna harus terdaftar dan diketahui oleh

pemerintah Kecamatan secara tertulis kemudian bisa memberikan fasilitas yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa fasilitas merupakan salah satu penunjang penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi. Dimana sebuah organisasi sulit untuk memperlancar pelaksanaan fungsinya ketika fasilitas itu yang tidak ada atau kurang memadai. Sebagaimana yang disampaikan Arikunto (2010), fasilitas dapat diartikan segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang, jadi dalam hal ini fasilitas yang dapat disamakan dengan sarana yang ada di Sekretariat Karang Taruna itu sendiri. Disini terlihat jelas bahwa memang ada fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Karang Taruna berupa satu gedung sebagai kesekretariatan. Namun perlengkapan yang ada di dalamnya tidak ada sehingga untuk mempermudah dan memperlancar jalannya organisasi tidak maksimal. Serta tidak adanya juga fasilitas yang diberikan dari Pemerintah Kecamatan dikarenakan tidak adanya laporan secara administrasi sebagai bukti keberadaan Karang Taruna tersebut. Sehingga untuk kelangsungan organisasi kedepannya dibutuhkannya suatu fasilitas yang cukup memadai agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Karang Taruna itu sendiri bisa tercapai secara maksimal.

b. Membimbing

Bimbingan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika ataupun kebetulan. Dalam hal ini bimbingan tidak dimaksud dalam pemberian bantuan berupa material, sumbangan, ataupun yang lainnya. Melainkan dalam melakukan proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi pembimbing berperan sebagai fasilitator perkembangan individu. Berdasarkan hasil wawancara Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Dalam proses membimbing Karang Taruna tingkat Desa ya seperti yang saya bahasakan tadi bahwa kita dari Kecamatan mengakomodir minimal 2 orang disetiap Desa untuk masuk dalam struktur kepengurusan tingkat Kecamatan agar dalam menjalankan tugas Karang Taruna Kecamatan itu bisa lebih mudah karena sudah ada perpanjangan tangan ke setiap Desa menyampaikan apa yang menjadi hasil keputusan dari Kecamatan itu sendiri, jadi pola bimbingan ini berkesinambungan dari Kecamatan ke Desa sampai ke masyarakat. “ (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng membimbing Karang Taruna tingkat Desa dengan cara mengakomodir minimal dua orang disetiap Desa untuk masuk dalam struktur kepengurusan tingkat Kecamatan agar dalam menjalankan tugas Karang Taruna Kecamatan bisa lebih mudah tersampaikan ke setiap Karang Taruna Desa. Pola bimbingan yang diterapkan oleh FPKT yaitu pola bimbingan secara berkesinambungan dari Kecamatan ke Desa sampai ke masyarakat. Sehingga mempermudah jalur informasi tersampaikan.

Senada dengan hasil wawancara Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Kita mengutus dua pengurus Karang Taruna Desa masuk ke pengurus Kecamatan sesuai dari permintaan dari Kecamatan agar setiap informasi dari Kecamatan itu bisa cepat sampai di kita, kalau untuk bimbingan yang dilakukan dari Kecamatan baru sebatas saran dan arahan saja dan bimbingan ke masyarakat secara langsung sampai hari ini belum ada yang kita lakukan karena kita juga belum ada dana untuk berkegiatan. “ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng, yang ada baru hanya memberikan saran dan arahan kepada Karang Taruna Desa. Untuk mengutus anggota Karang Taruna Desa masuk dalam struktur kepengurusan Kecamatan, Karang Taruna Desa telah mengutus dua pengurusnya. Namun itu belum secara maksimal memberikan kontribusi kepada Karang Taruna Desa. Sementara untuk bimbingan yang dilakukan ke pemuda Desa belum ada sama sekali dikarenakan tidak ada dana yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Berlanjut dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dalam hal ini pemuda di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengungkapkan bahwa :

“ tidak ada bimbingan yang dilakukan itu, bagaimana caranya mau bimbingan kalau untuk memperkenalkan Karang Taruna saja ke masyarakat itu tidak ada, jadi yang kita tahu Cuma namanya saja biasa kita dengar iya, cobalah bisa melakukan bimbingan dan pelatihan ke pemuda pasti banyak inovasi bisa dilakukan. “ (Hasil wawancara AW, 20 Desember 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat belum mendapatkan bimbingan dari Karang Taruna itu sendiri. Bahkan nama Karang Taruna itu sendiri belum familiar ditelinga masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Karang Taruna. Ada harapan besar yang ada dalam

masyarakat terutama pemuda untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun tidak bisa terekspose karena tidak adanya bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh Karang Taruna.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa dalam proses bimbingan ataupun membimbing bukan hanya sebatas kegiatan yang bersifat sementara ataupun pemberian dalam bentuk material, sumbangan dan lain-lain. Akan tetapi butuh suatu hal yang sifatnya berkesinambungan dan berkelanjutan dalam proses bimbingan tersebut. Di sini terlihat jelas ada ketimpangan dalam proses bimbingan. Dimana masyarakat (pemuda) itu sendiri tidak mendapatkan bimbingan namun memiliki potensi yang besar untuk membangun suatu Desa. Serta Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan juga belum melakukan bimbingan secara maksimal ke setiap Karang Taruna Desa. Sehingga terjadi kesenjangan di Karang Taruna Desa itu sendiri. Untuk membimbing pengurus dan pemuda di Desa tidak bisa dikarenakan bimbingan yang didapatkan dari FPKT Kecamatan juga tidak ada. Jadi, perlu adanya bimbingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng agar bisa mengembangkan potensi pengurus dan anggota serta pemuda. Serta bisa mengasah skill agar bisa mengembangkan organisasi, Desa, serta Kecamatan secara umum.

c. Pengembangan

Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi.

Karena menyangkut perubahan sikap, persepsi, perilaku dan harapan semua organisasi. Berdasarkan hasil wawancara Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Mengenai pengembangan Karang Taruna Desa itu sendiri, kita dari Karang Taruna Kecamatan berupaya terus menerus untuk terus mendampingi dan memberikan arahan kepada mereka, karena untuk sekarang belum ada pengembangan secara langsung karena kita juga masih baru, makanya lagi-lagi dengan adanya pengurus yang kita ambil dari setiap Desa itulah tugasnya nantinya untuk melakukan pengembangan Karang Taruna di tingkat Desa masing-masing. “ (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng dalam melakukan pengembangan Karang Taruna tiap Desa belum ada yang dilakukan secara langsung. Namun, FPKT Kecamatan Patimpeng akan berupaya untuk mendampingi dan memberikan arahan ke Karang Taruna tingkat Desa dengan cara mengambil pengurus dari setiap Desa agar dapat mengembangkan Karang taruna.

Lanjut hasil wawancara Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Untuk mengembangkan Karang Taruna ini, kita butuh dana dan bantuan dari Karang Taruna Kecamatan agar bisa lebih mudah memberikan pendampingan ke anggota, namun sampai hari ini belum ada juga pengembangan yang dilakukan dari Kecamatan sehingga kita juga nda bisa melakukan pengembangan anggota untuk meningkatkan Karang Taruna ini, selain itu juga karena tidak adanya dana sehingga tidak ada sama sekali yang bisa kita lakukan. “ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng belum bisa melakukan pengembangan Karang Taruna disebabkan tidak adanya dana yang dimiliki serta tidak adanya bantuan dari FPKT Kecamatan untuk melakukan pengembangan

Karang Taruna. Sehingga untuk pengembangan anggota Karang Tarunapun belum ada yang dilakukan sama sekali.

Berlanjut hasil wawancara salah satu anggota Karang Taruna Di Desa Batulappa terkait dengan pengembangan Karang Taruna, mengungkapkan bahwa :

“ kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada arahan dan pelatihan yang dilakukan oleh Karang Taruna itu sendiri, kita juga belum tau jelas apa yang mau kita lakukan ke depannya, sehingga untuk mengembangkan Karang Taruna ini sendiri nda bisa apa-apa. (Hasil wawancara SA, 20 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa anggota Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng tidak bisa melakukan pengembangan Karang Taruna dikarenakan tidak adanya arahan dan pelatihan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Serta tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya sebagai anggota Karang Taruna. Dalam hal ini anggota Karang Taruna butuh pengarahan yang menjadi tugasnya sebagai pengurus untuk mengembangkan Karang Taruna.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa dalam proses pengembangan Karang Taruna belum berjalan secara maksimal. Dimana proses pengembangan organisasi itu lebih menitik beratkan pada perubahan diri ataupun kelompok dalam sebuah organisasi. Sesuai yang dikatakan Warren Burken dan Schmidt (dalam Yayat Hayati, 2015), mengemukakan bahwa dengan menggunakan pengetahuan dan teknik dari ilmu perilaku, pengembangan organisasi adalah suatu proses yang berupaya untuk meningkatkan efektifitas dengan cara mengintegrasikan kebutuhan individu untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan-tujuan organisasi. Proses ini merupakan

upaya perubahan yang direncanakan yang mengakibatkan suatu sistem secara keseluruhan dalam suatu kurun waktu serta berkaitan dengan misi organisasi. Disini terlihat jelas bahwa pengembangan organisasi Karang Taruna yang dilakukan oleh Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan terhadap Karang Taruna tingkat Desa belum ada sama sekali yang dilakukan. Yang ada hanya sebatas arahan dan pendampingan yang dilakukan itupun belum maksimal. Salah satu alasannya juga karena FPKT Kecamatan ini baru aktif kembali setelah berapa lama vacuum. Serta Karang taruna tingkat Desa juga belum ada pengembangan organisasi terhadap pengurusnya yang menjadikan pengurus Karang Taruna tidak bisa melakukan tugasnya. Selain itu pengurus Karang Taruna juga ada yang belum tahu tugasnya sebagai pengurus Karang Taruna. Hal ini yang perlu dilakukan evaluasi oleh Karang Taruna itu sendiri, untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu agar pengurus bisa mengetahui tugasnya sesuai dengan misi dari Karang Taruna. Karena pengembangan organisasi tidak bisa dilakukan hanya dari satu pihak. Melainkan saling bekerjasamanya antara ketua dengan anggota untuk meningkatkan efektivitas pengembangan organisasi. Dilain pihak juga butuh kerjasama serta pendampingan yang berkesinambungan antara Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan dengan Karang Taruna Desa baik secara individu maupun secara kelompok.

C. Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna

1. Fasilitas Penunjang Keterampilan

Fasilitas merupakan salah satu sarana dan prasana penting yang digunakan untuk mempermudah jalannya suatu organisasi. Dimana fasilitas baik berupa

barang maupun jasa sebagai penunjang dalam menjalankan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa terkait dengan kontribusi yang diberikan dalam pembinaan Karang Taruna, mengatakan bahwa :

“ Itu kemarin ndi, Karang Taruna ya yaitu bisa kasi pelatihan untuk kontribusinya bisa kita anggarkan rencananya tahun depan kita anggarkan untuk peningkatan kapasitas Karang Taruna, intinya iya kita dukung dia dalam bentuk dana sesuai dengan kemampuan keuangan desa toh, intinya seperti itu, terus yang kedua kita disini memberikan motivasi kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat utamanya pemuda ya, contoh olahraga salah satunya itu adalah fasilitas lapangan bola volly dan contohmya kemarin acara 17 agustus ya ada tim sepak bola khusus Karang Taruna Desa Batulappa, satu-satunya tim Di Kecamatan Patimpeng khusus atas nama Karang Taruna. “ (Hasil wawancara HM, 14 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Desa Batulappa akan memberikan kontribusi kepada Karang Taruna berupa fasilitas dana untuk meningkatkan kapasitas dari Karang Taruna sesuai dengan keuangan desa. Pemerintah Desa juga memberikan motivasi kepada Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu kontribusi yang diberikan kepada Karang Taruna fasilitas dibidang olahraga yaitu penyediaan lapangan bola volly untuk kegiatan keolahragaan. Serta memperkenalkan Karang Taruna di Kecamatan Patimpeng pada saat HUT RI dengan mengikuti salah satu cabang olahraga yaitu sepak bola.

Senada hasil wawancara dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan Bahwa :

“ Ya memang kemarin di acara 17 agustus kita memperkenalkan Karang Taruna Di Desa Batulappa ini dengan ikut serta mendaftar dalam pertandingan tim sepak bola, jadi pemainnya itu dari pengurus Karang Taruna itu sendiri bersama dengan para pemuda Di Desa Batulappa ini, ini juga merupakan salah satu langkah awal untuk mensosialisasikan Karang Taruna kepada masyarakat, dengan membentuk tim sepak bola kita juga secara langsung berbaur dengan pemuda untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang olahraga. “ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa membenarkan penyampaian Pemerintah Desa dalam memberikan kontribusi fasilitas dalam menunjang keterampilan pengurus dan masyarakat secara langsung. Salah satu cara yaitu Karang Taruna ikut serta dalam perlombaan sepak bola dalam memperingati HUT RI. Serta merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan Karang Taruna kepada masyarakat Desa Batulappa pada khususnya dan Kecamatan Patimpeng pada umumnya. Dengan adanya tim sepak bola ini, Karang Taruna dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pemuda dalam mengembangkan minat dan bakatnya dibidang olahraga.

Lanjut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat terkait dengan kontribusi Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa, mengatakan bahwa :

“ kemarin memang Karang Taruna ikut serta dalam pertandingan sepak bola 17 agustus, dan pemainnya itu dari pengurus Karang Taruna sama Pemuda di Desa Batulappa termasuk juga saya salah satunya, bagus sebenarnya kalo begini karena bisa mengakomodir teman-teman untuk megembangkan bakatnya serta memberikan ruang kepada pemuda untuk memberikan sumbangsi kepada desa. “ (Hasil wawancara Sn, 20 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masyarakat Desa Batulappa terlibat langsung dalam kegiatan Karang Taruna dibidang olahraga. Dengan ikut serta dalam kegiatan pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati HUT RI. Dengan adanya tim sepak bola bisa mengakomodir pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan minat dan bakatnya dibidang olahraga.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa Pemerintah Desa telah memberikan kontribusi dalam proses pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa. Pemerintah Desa telah menyediakan fasilitas untuk dibidang olahraga kepada Karang Taruna untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Anne Ahira (2012), mengemukakan bahwa kontribusi dapat diartikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi fasilitas penunjang keterampilan Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng yaitu Pemerintah Desa Batulappa telah memfasilitasi lapangan bola volly untuk digunakan Karang Taruna dalam mengembangkan minat dan bakat pemuda di Desa Batulappa. Namun untuk bidang yang lain belum ada kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Ini yang harus dipikirkan dan rencanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Karang Taruna agar bisa menyediakan fasilitas yang bisa digunakan oleh Karang Taruna untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serta juga meningkatkan kepekaan dan potensi pemuda terhadap lingkungan yang lebih mengarah ke hal positif.

2. Pemberdayaan Karang Taruna

Pemberdayaan diartikan dapat membuat suatu menjadi berdaya atau mempunyai daya ataupun kekuatan. Dalam hal ini, memiliki kemampuan setiap individu untuk mengambil keputusan serta bertanggung jawab dengan keputusan

yang dimiliki untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengungkapkan bahwa :

“ Rencana kedepan pemberdayaan Karang Taruna dari Desa ingin membantu Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan yang lebih luas lagi, apalagi namanya mungkin dari kerja bakti Desa kan baksos namanya untuk melibatkan masyarakat banyak tapi yang menjadi apa namanya, eh motivator utamanya adalah Karang Taruna dibantu oleh Pemerintah Desa, intinya bahwa kita, saya, kami selaku Pemerintah Desa sangat mendukung program-program Karang Taruna tergantung juga bagaimana dia punya kreativitas Karang Taruna itu sendiri apa programnya kalo memungkinkan kita bantu dengan dana apa dan lain sebagainya kita bantu tapi tentu dengan usulan dan sebagaimana macam. “ (Hasil wawancara HM, 14 Desember 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng dalam melakukan pemberdayaan Karang Taruna akan berupaya untuk membantu Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan yang lebih luas seperti kerja bakti atau bakti sosial. Kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan yang menjadi motivator utama adalah Karang Taruna. Pemerintah Desa sangat mendukung segala kegiatan dan program kerja Karang Taruna ketika ada yang akan dilaksanakan tergantung dari kreativitas dari Karang Taruna itu sendiri. Serta Pemerintah Desa juga akan memberikan bantuan dana dari setiap kegiatan Karang Taruna. Namun harus diusulkan dahulu agar Pemerintah Desa bisa memberikan bantuan dana.

Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Strategi pribadiku ini selaku ketua Karang Taruna, ditingkat-tingkat Desa itu dengan adanya dana desa banyak lapangan kerja terbuka toh, contoh banyak perekrutan seperti kader teknik di Desa toh, adanya mungkin yang program baru initentang program inovasi desa dibutuhkan orang-orang untuk bergabung nanti, saya sebagai pendamping caraku memberikan masukan

kepada Kepala Desa sebisa mungkin yang diakomodir untuk ikut bergabung disitu, bekerja distu orang-orang Karang Taruna dan Pemerintah merespon positif dan teman-teman Karang Taruna ikut terlibat dalam program dengan adanya dana desa ini. “ (Hasil wawancara AA, 15 Desember 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng dalam melakukan pemberdayaan Karang Taruna telah mempunyai strategi sendiri. Dengan adanya dana desa ditingkat Desa menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan, seperti kader teknik Desa dan program inovasi desa. Dari lapangan pekerjaan itu membutuhkan banyak orang untuk bergabung. Ketua Umum FPKT Kecamatan Patimpeng yang sekaligus pendamping Desa memberikan saran kepada Pemerintah Desa untuk mengakomodir pengurus Karang Taruna untuk bergabung di lapangan pekerjaan tersebut.

Berlanjut dengan hasil wawancara dengan Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng, mengatakan bahwa :

“ Belum ada yang secara langsung pemberdayaan dilakukan baik itu dari Pemerintah Desa maupun dari Karang Taruna Kecamatan, kita juga tidak bisa berkegiatan karena belum adanya dana, sehingga untuk program kerja dan anggaran baru kita rencanakan untuk tahun depan, supaya nantinya bisa berkegiatan dengan anggaran yang memadai.“ (Hasil wawancara AH, 15 Desember 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Ketua Umum Karang Taruna Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng belum mendapatkan pemberdayaan secara langsung dari Pemerintah Desa maupun dari Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan. Serta belum bisa melaksanakan kegiatan karena tidak ada dana yang dimiliki Karang Taruna.

Sehingga untuk program kerjanya baru di anggarkan dan akan masuk dalam penganggaran periode tahun depan yaitu periode tahun 2018.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa pemberdayaan Karang Taruna dari Pemerintah Desa belum ada secara langsung baru dalam tahap perencanaan. Begitupun dengan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan belum ada pemberdayaan langsung yang dilakukan ke Karang Taruna. Sementara pendapat Shardlow (dalam Risyanti Riza : 2006) mengatakan pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan bahwa Karang Taruna harus bisa lebih mandiri tanpa harus berkaitan terus menerus. Selain itu, Karang Taruna juga tetap mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Desa dan FPKT Kecamatan. Dalam hal pemberdayaan, Karang Taruna harus berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Karang Taruna itu sendiri tanpa harus terkendala oleh dana. Selain itu Pemerintah Desa juga harus memberikan sumbangsi yang berkelanjutan ke Karang Taruna untuk melakukan pemberdayaan organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola Pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa
 - a. Pembinaan Fungsional

Pembinaan secara fungsional yang dimaksud adalah di dalam pelaksanaan ada fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Fungsi koordinasi Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone belum berjalan secara maksimal. Dimana tidak adanya jalur koordinasi yang berjalan antara Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan dengan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan dalam membina Karang Taruna Desa. Sehingga dalam menjalankan program kerjanya dalam Karang Taruna di Desa sulit terlaksana.

Komunikasi yang dilakukan dalam melakukan pembinaan Karang Taruna Di Desa Batulappa belum maksimal. Baik itu antara Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan dengan FPKT Kecamatan maupun antara Ketua Umum Karang Taruna dengan anggotanya. Sementara untuk meningkatkan kinerja dan melakukan proses pembinaan yang berkelanjutan dibutuhkan komunikasi yang lebih apalagi tergolong masih baru. Jadi perlu ada pengevaluasian baik di internal

maupun di eksternal agar ketika proses pengendalian organisasi dapat berjalan lancar.

Sementara dalam fungsi kolaborasi Karang Taruna dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya belum efektif, terlihat jelas masyarakat belum merasakan kehadiran dari Karang Taruna itu sendiri sehingga untuk tersentuh serta ikut serta dalam berpartisipasi pada kegiatan Karang Taruna tidak ada sumbangsi dari masyarakat. Kesuksesan dan kegagalan dalam sebuah organisasi ditentukan oleh kerja sama tim yang baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi, baik itu kerjasama dengan internal maupun eksternal. Namun kerja sama tidak akan terbentuk jika tidak ada komunikasi yang baik dari setiap elemen yang terkait. Dalam hal ini kurangnya kerjasama antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa menjadikan dana untuk melakukan kegiatan tidak ada.

b. Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud adalah memfasilitasi, membimbing dan pengembangan kepada Karang Taruna selaras dengan tugas pokok serta fungsinya dalam pelaksanaan program kerjanya. Fasilitas merupakan salah satu penunjang penting dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi suatu organisasi. Pemerintah Desa telah memberikan fasilitas kepada Karang Taruna berupa sekretariat untuk kegiatan organisasi. Namun perlengkapan yang ada di dalamnya tidak ada sehingga untuk mempermudah dan memperlancar jalannya organisasi tidak maksimal.

Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan belum melakukan bimbingan secara maksimal ke setiap Karang Taruna Desa. Sehingga terjadi

kesenjangan di Karang Taruna Desa itu sendiri. Untuk membimbing pengurus dan pemuda di Desa tidak bisa dikarenakan bimbingan yang didapatkan dari FPKT Kecamatan juga tidak ada. Sementara ada potensi besar yang dimiliki pemuda yang tidak tersalurkan karena tidak adanya bimbingan dari Karang Taruna.

Pengembangan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone belum berjalan secara maksimal. Peningkatan Karang Taruna yang dilakukan oleh Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan terhadap Karang Taruna tingkat Desa belum ada sama sekali yang dilakukan. Yang ada hanya sebatas arahan dan pendampingan yang dilakukan itupun belum maksimal. Serta perlunya pengembangan terhadap anggota dan pengurus karena masih ada yang belum paham akan tugasnya dalam Karang Taruna.

2. Kontribusi Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna

a. Fasilitas Penunjang Keterampilan

Pemerintah Desa telah memberikan kontribusi dalam proses pembaharuan Karang Taruna Di Desa Batulappa. Pemerintah Desa telah menyediakan fasilitas untuk dibidang olahraga kepada Karang Taruna untuk melakukan kegiatan-kegiatan berhubungan secara terbuka kepada masyarakat. Namun untuk bidang yang lain belum ada kontribusi secara kasat mata bisa dirasakan masyarakat dari Pemerintah Desa.

b. Pemberdayaan Karang Taruna

Pemberdayaan Karang Taruna dari Pemerintah Desa belum ada secara langsung baru dalam tahap perencanaan. Begitupun dengan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan belum ada pemberdayaan langsung yang

dilakukan ke Karang Taruna. Dalam hal pemberdayaan, Karang Taruna harus berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Karang Taruna itu sendiri tanpa harus terkendala oleh dana. Selain itu Pemerintah Desa juga harus memberikan sumbangsi yang berkelanjutan ke Karang Taruna untuk melakukan pemberdayaan organisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyarankan agar dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone harus lebih ditingkatkan. Dalam melakukan pembinaan secara fungsional, semua stakeholder harus menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama perlu terbina secara teratur dari semua elemen. Dalam pembinaan teknis yaitu memfasilitasi, melakukan bimbingan, dan pengembangan Karang Taruna akan berjalan baik ketika pembinaan fungsional berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne, Ahira, 2012. *Jurnal Penelitian Ilmiah*. (Online).
(<http://www.anneahira.com/jurnal-penelitian.htm>)
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Djarmiko, Yayat Hayati, 2015. *Perilaku Organisasi*, Bandung : Alfabeta.
- Finer, Samuel Edward, 2006. *Comparative Government, terjemahan*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul, 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya*, Yogyakarta :Pustaka Fajar.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*, Jakarta : Erlangga.
- Juanda,2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*,Bandung :PT Alumni.
- Jumaili, Salman, 2005. *Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual*, Simposium Nasional Akuntansi XII, September.
- Mathis, dan Jackson, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Salemba Empat.
- Muchsan, dan Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Musanef, 2000. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*,Jakarta : Haji Masagung.
- Ohama, Yutaka, 2001. *Conceptual Framework of Partisipatory Local Social Development. Nagoya : JICA*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/ HUK / 2010 Tentang Pedoman dasar Karang Taruna.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang : Alqa Print Jatinangor.
- Sedarmayanti, 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*, Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

- Suharto, Edi, 2004. *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsep, Indikator, dan Strategi*, Malang.
- Sulistyaningsih, 2004. *Usaha Kecil Dalam Perekonomian Nasional, Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil*, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Syafie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras.
- Thoha, Miftah, 2001. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tikson, 2001. *Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Perkotaan, Makalah PPs Unhas, Unhas Makassar*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tutik, Titik Triwulan, 2005. *Hukum Tata Negara*, Jakarta : Presentasi Pusaka.
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, A. W, 2000. *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta : Raja Wali.
- Widjaja, A. W, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

L A M P I R A N - L A M P I R A N



Gambar 2. Penerimaan Surat Penelitian Di Kantor Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone



Gambar 3. Setelah Wawancara Dengan Kepala Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone



Gambar 4. Wawancara Dengan Ketua Umum Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone



Gambar 5. Wawancara Dengan Ketua Umum Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone



Gambar 6. Wawancara Dengan Anggota Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone



Gambar 7. Orientasi Pengurus Karang Taruna Kecamatan Patimpeng, Kahu, Bontocani Kabupaten Bone



Gambar 8. Papan Nama Karang Taruna Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

MEDIA INFORMASI MONOGRAFI DESA

KEADAAN PADA BULAN : _____ TAHUN : _____

- NAMA DESA : BATULAPPA
- TAHUN PEMBENTUKAN : 1993
- DASAR HUKUM PEMBENTUKAN : _____
- NOMOR KODE WILAYAH : _____
- NOMOR KODE POS : 92775
- KECAMATAN : PATIMPENG
- KABUPATEN / KOTA : BONE
- PROVINSI : SULAWESI SELATAN

A. DATA UMUM

NO	INDIKATOR	Uraian / Deskripsi / Keterangan	Nilai / Jumlah / Persentase
1	LOKASI DESA		
2	WILAYAT PEMBENTUKAN DESA		
3	LUAS WILAYAH		
4	BENTUK WILAYAH		
5	A. BENTUK UTARA		
6	B. BENTUK SELATAN		
7	C. BENTUK BARAT		
8	D. BENTUK TIMUR		
9	JARAK DESA DARI PUSAT PEMERINTAHAN		
10	A. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN	5	km
11	B. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KOTA	107	km
12	C. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN	107	km
13	D. JARAK DARI IBUKOTA PROVINSI	1186	km
14	Jumlah Tanah Bersertifikat		
15	LUAS TANAH KAS DESA	2106	Ha
16	Jumlah Penduduk	1075	Jawa 525 KK
17	A. Laki-laki	1028	
18	B. Perempuan	487	
19	C. Usia 0 - 5	1187	
20	D. Usia 6 - 15	354	

Gambar 9. Papan Informasi Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

RIWAYAT HIDUP



Andi Akbar. Lahir di Batulappa tanggal 10 Maret 1992, Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda A. Kadir dengan Ibunda A. Esse.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 1998 di Sekolah Dasar SD Negeri 259 Patimpeng Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Tonra Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 2007. Di bangku sekolah pertama, penulis aktif di organisasi ekstrakurikuler yaitu PRAMUKA. Kemudian penulis melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 2010. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, penulis aktif di berbagai organisasi ekstrakurikuler, diantaranya PRAMUKA, OSIS, dan PMR. Tahun 2013, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara dan lulus dengan IPK 3,85. Semasa kuliah, penulis aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus, diantaranya Sekretaris Umum di DPC KEPMI BONE KECAMATAN PATIMPENG Periode 2014 – 2015, Pengurus Forum Pemuda Bahari Indonesia (FPBI) DPW SULSEL Periode 2014 – 2016, Pengurus BEM FISIP UNISMUH Makassar Periode 2015 – 2016, Pengurus KEPMI BONE Kom. TATG Periode 2015 – 2016, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) FISIP UNISMUH Makasar Periode 2016 - 2017